PEMERINTAH
KABUPATEN SRAGEN

MAL PELAYANAN PUBLIK

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



DPMPTSP

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2023 dapat diselesaikan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, hal ini juga merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *good and clean government.*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 merupakan hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen yang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya. Hal ini sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 ini semoga bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dalam meningkatkan kinerja serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang akan datang.

Sragen, Pebruari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SRAGEN

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19791225 199810 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. dr. Soetomo No.5 Telp.0271-892348 (hunting), Fax 0271-894433
Website http://dpmptsp.sragenkab.go.id/, E-mail dpmptsp@sragenkab.go.id

SRAGEN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 000.8.6.3/ 368 /18/2024

TENTANG

PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Sragen, perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;

11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen; dan
12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tahun 2023, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sistematika Laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut ;

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sragen pada
tanggal 28 - 02 - 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19791225 199810 1 001

Salinan disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Sragen;
2. Kepala Baperida Kabupaten Sragen;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sragen
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sragen;
5. Kepala Bagian Organisasi

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pedoman SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dengan ini Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

LKjIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang PetunjukTeknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini memuat visi, misi, pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, target dan realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi, target dan realisasi indikator kinerja sasaran strategis, penjelasan atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. Fokus laporan ini adalah pencapaian tujuan/ sasaran strategis yang bersifat hasil *(outcome)* dan atau keluaran *(output)* penting. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Sasaran :

1. Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk mengukur kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu

1. Nilai realisasi penanaman modal (trilyun rupiah)
2. Jumlah PMA/ PMDN (investor)

Realisasi kinerja indikator **Nilai realisasi penanaman modal** tahun 2023 sebesar **2,2** trilyun rupiah sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu **1,55** trilyun rupiah, sehingga capaian kinerjanya sebesar **142%** masuk kategori **Sangat Baik**. Realisasi kinerja indikator **Jumlah PMA/ PMDN** tahun 2023 sebesar **14.936** investor sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu **1.313** sehingga capaian kinerjanya sebesar **1.138%** masuk kategori **Sangat Baik.**

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disampaikan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
KATA PENGANTAR		ii
IKHTISAR EKSEKUTIF		iii
DAFTAR ISI		iv
DAFTAR TABEL		v
BAB I.	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Tugas dan Fungsi	2
	C. Struktur Organisasi Perangkat Daerah	
	D. Permasalahan dan Isu Strategis	5
	E. Sistematika Penyajian	6
BAB II.	PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	8
	A. Reviu Rencana Strategis	8
	B. Indikator Kinerja Utama	9
	C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	10
	D. Perencanaan Anggaran Tahun 2023	13
BAB III.	AKUNTABILITAS KINERJA	19
	A. Capaian Kinerja Organisasi	19
	B. Realisasi Anggaran	39
BAB IV	PENUTUP	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah ASN Berdasarkan Golongan	4
Tabel 1.2	Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan	5
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama	10
Tabel. 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	11
Tabel. 2.2	Perubahan Kinerja TAhun 2023	12
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja	19
Tabel 3.2	Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2023	20
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Dua Tahun sebelumnya	21
Tabel. 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra	22
Tabel. 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan RPJMD	22
Tabel. 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan standar Nasional	23
Tabel. 3.7	Analisis Keberhasilan	23
Tabel. 3.8	Realisasi Investasi Tahun 2023	24
Tabel. 3.9	Analisis Atas Penggunaan Sumberdaya	26
Tabel. 3.10	Analisis Pendukung/Hambatan Capaian Kinerja	28
Tabel. 3.11	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis	33
Tabel. 3.12	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Mendukung Sasaran Penunjang	36

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Adapun struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen adalah sesuai dengan bagan dibawah ini:

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yangmenggantikan peraturan sebelumnya yaitu Instruksi Presiden Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misiorganisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

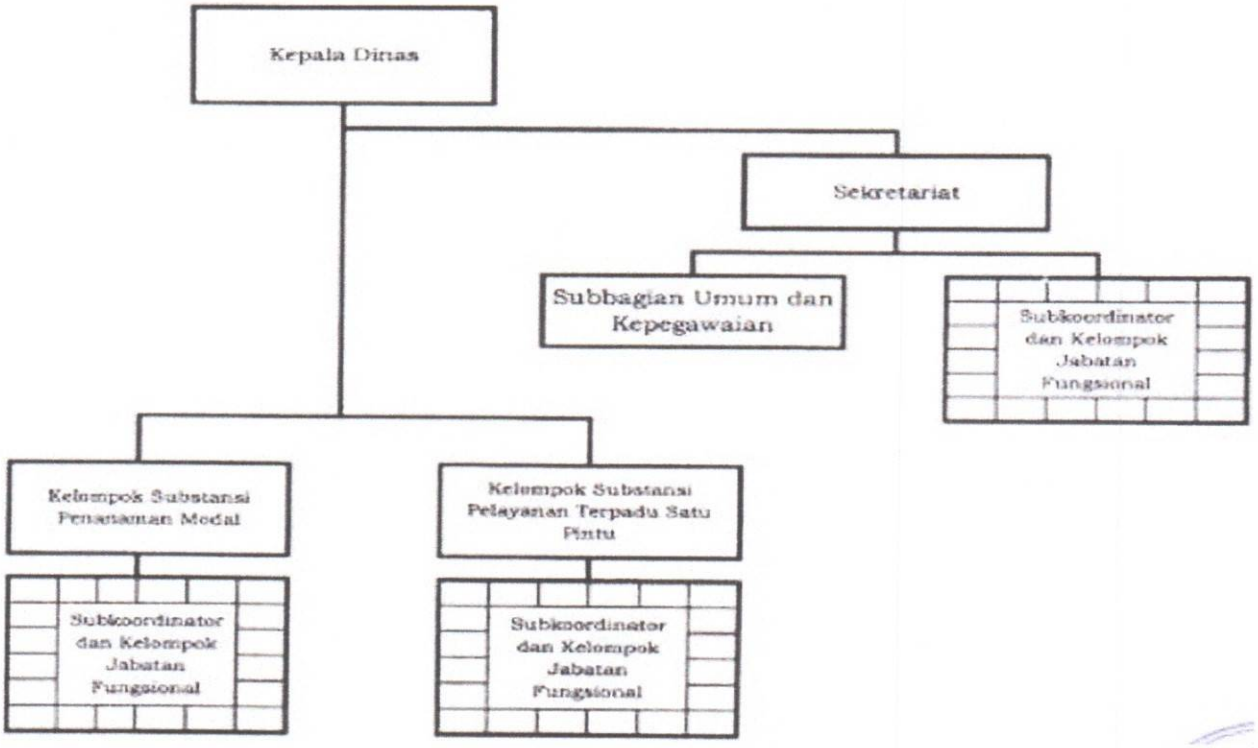
Guna mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kabupaten Sragen sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapansistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKABUPATEN SRAGEN



Gambar 1.1

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (*human resources*) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

TABEL 1.1

JUMLAH ASN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023

BERDASAR GOLONGAN

Golongan / Ruang	Eselon				Staf	Jumlah
	II	III	IV	JF		
Golongan IV/c	1					
Golongan IV/b		1		2		
Golongan IV/a			1			
Jumlah Golongan IV	1	1	1	2	0	5
Golongan III/d				7	7	
Golongan III/c				1		
Golongan III/b					1	
Golongan III/a					2	
Jumlah Golongan III	0	0	0	8	10	18
Golongan II/d						
Golongan II/c				1		
Golongan II/b						
Golongan II/a					1	
Jumlah Golongan II	0	0	0	0	1	1
Golongan I/d						
Golongan I/c						
Golongan I/b						
Golongan I/a						
Jumlah Golongan I	0	0	0	0	0	0
Total	1	1	1	10	11	24

Sumber data : DPMPTSP Tahun 2023

TABEL 1.2

JUMLAH ASN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 BERDASAR PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG
1	DOKTOR (S3)	-
2	PASCASARJANA (S2)	5
3	SARJANA (S1)	18
4	SARJANA MUDA (D3)	1
5	SLTA / SMEA / MA	0
6	SLTP	0
7	SD	0
JUMLAH		**24**

Sumber data : DPMPTSP Tahun 2023

D. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen. Permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen, yaitu:

1. Perencanaan Penanaman Modal belum optimal;
2. Belum optimalnya kualitas promosi penanaman modal;
3. Terdapat potensi investasi yang belum teridentifikasi;
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan *integrasi* system;
5. Belum optimalnya publikasi bidang perizinan/ nonperizinan;
6. Munculnya permasalahan perizinan;
7. Minimnya kajian investasi;
8. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*One Single Submission*) belum optimal; dan
9. Pelayanan belum menjangkau seluruh jenis layanan.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Belum optimalnya koordinasi dan integrasi perencanaan kebijakan penanaman modal;
2. Perlunya pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi (*mal pelayanan publik)*;
3. Belum optimalnya kualitas promosi penanaman modal;
4. Belum optimalnya kerjasama penanaman modal dengan *stake holder*;
5. Belum adanya kebijakan fasilitas dan insentif penanaman modal;
6. Minimnya kajian investasi;
7. Belum optimalnya dukungan pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronika (*Online Single Submission*);
8. Belum optimalnya pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko;
9. Belum optimalnya indeks kepuasan masyarakat;
10. Peningkatan sosialisasi dan publikasi peraturan bidang perizinan/ nonperizinan;

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Perangkat Daerah Dinas Arsip dan Perpustakaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun 2023. Analisis capaian kinerja terhadap Perjanjian Kinerja memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja *(performance gap)* bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Selanjutnya, sistematika penyajian LKJIP Perangkat Daerah Dinas Arsip dan Perpustakaan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bagian ini membahas beberapa hal yang berkaitan dengan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi oleh organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Perencanaan kinerja adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam manajemen kinerja organisasi. Dalam perencanaan kinerja dirumuskan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai. Pencapaian kinerja memperhatiakn berbagai aspek yaitu arah kebijakan, strategi organisasi, dan perjanjian kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sragen sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi yang telah dilakukan. Terkait dengan capaian kinerja organisasi, dipaparkan pencapaian atas indikator utama dan hal-hal berkaitan dengan capaian tersebut.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021;
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun yang menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja;
5. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2023 (Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya)

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sragen. Kedua, diuraikan beberapa rekomendasi langkah-langkah yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. REVIU RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 merupakan acuan dalam perencanaan, pemrograman dan penganggaran berbasis kinerja untuk menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang sangat menentukan agar mampu menjawab tantangan kinerja serta tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas, terukur dan terpadu, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada serta harus mendukung tercapainya target kinerja yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan indikatif selama 5 tahun.

1. Visi dan Misi

   - Visi

     Visi Bupati Sragen "**Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong**"

   - Misi

     Dalam mencapai Visi tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen menerapkan Misi Kepala Daerah dan Pembangunan Daerah agar Visi yang diharapkan dapat tercapai yaitu: **"Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Ketahanan Pangan"**

2. Tujuan dan Sasaran

   - Tujuan

     Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan

misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Berdasarkan misi tersebut diatas, maka tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah

Dengan indikator tujuan sebagai berikut:

Nilai realisasi penanaman modal

- Sasaran

Adapun sasaran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah"

Dalam mencapai Sasaran tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Sragen menerapkan Indikator Sasaran agar sasaran yang diharapkan dapat tercapai. Adapun indikator sasaran sebagai berikut;

Jumlah PMA/PMDN (investor).

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah untuk ke depannya. Sehingga bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

TABEL 2.1

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

No	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)	TARGET					KONDISI AKHIR
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**TUJUAN** : Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Nilai realisasi penanaman modal (trilyun rupiah)	**Alasan Pemilihan Indikator:** Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah . **Formulasi Pengukuran:** Nilai investasi dalam tahun berjalan. **Tipe Perhitungan:** Komulatif **Sumber Data:** Pengolahan data sistem informasi perizinan dan penanaman modal	1,50	1,55	1,60	1,65	1,70	8,00
1.1	**SASARAN** : Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN (investor)	**Alasan Pemilihan Indikator:** Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam peningkatan iklim usaha yang berdaya saing dan kualitas penyelenggaraan perizinan berusaha, yang mendukung peningkatan jumlah PMA/ PMDN (investor). **Formulasi Pengukuran:** Jumlah PMA/ PMDN (penanam modal/ investor) dalam tahun berjalan. **Tipe Perhitungan:** Komulatif **Sumber Data:** Pengolahan data sistem informasi perizinan dan penanaman modal	1.250	1.313	1.378	1.447	1.519	6.907

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Melalui perjanjian kinerja ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dan Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Selain itu juga menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

TABEL 2.2

PERJANJIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	4	
1	**Tujuan Strategis :** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Nilai realisasi penanaman modal	1,55	trilyun rupiah
2	**Sasaran Strategis:** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN	1.313	investor
3	**Sasaran Penunjang:** Meningkatnya akuntabilitaskinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	BB (70,30)	predikat

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupten/Kota	5.268.164.699	DAU
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	211.237.000	DAU
3	Program Promosi PenanamanModal	141.240.500	DAU
4	Program Pelayanan PenanamanModal	507.849.000	DAU
5	Program Pengendalian dan Pelaksanaan	386.000.000	DAK NON FISIK
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	108.392.000	DAU
	JUMLAH	6.622.883.199	

TABEL 2.3

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	4	
1	**Tujuan Strategis :** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Nilai realisasi penanaman modal	1,55	trilyun rupiah
2	**Sasaran Strategis:** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN	1.313	investor
3	**Sasaran Penunjang:** Meningkatnya akuntabilitaskinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	BB (70,30)	predikat

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupten/Kota	5.880.965.608	DAU
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	211.237.000	DAU
3	Program Promosi Penanaman Modal	134.104.100	DAU
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	482.718.500	DAU
5	Program Pengendalian dan Pelaksanaan	386.000.000	DAK NON FISIK
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	104.492.000	DAU
	JUMLAH	7.199.517.208	

D. PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2023

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja maupun target kinerja program/ kegiatan, maka perlu di dukung oleh anggaran yang memadai. Selama Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung sumberdana dari Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) guna mencapai targe kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun anggaran Tahun 2023 sebagai berikut;

TABEL 2.4

ANGGARAN BELANJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun**	**%**	**40**	**211.237.000**
18.02.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah penyusunan peta potensi investasi**	**dokumen**	**2**	**211.237.000**
18.02.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	dokumen	1	88.839.000
18.02.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	dokumen	1	122.398.000
18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/ PMDN skala menengah/ besar**	**%**	**20**	**141.240.500**
18.03.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**jumlah even promosi**	**kali**	**2**	**141.240.500**
18.03.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	2	141.240.500
18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan**	Poin	83	**507.849.000**
18.04.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan**	**%**	**100**	**507.849.000**
18.04.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	1200	131.252.000
18.04.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang endapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan usaha	500	216.033.000
18.04.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	93	63.487.000
18.04.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Kegiatan usaha	150	97.077.000

18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM**	**%**	**10**	**386.000.000**
18.05.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal**	**%**	**100**	**386.000.000**
18.05.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan	60	54.000.000
18.05.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	315	238.000.000
18.05.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan	Kegiatan	100	94.000.000
18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik**	**%**	**40**	**108.392.000**
18.06.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyediaan data informasi perizinan/ non perizinan**	**%**	**40**	**108.392.000**
18.06.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	1	108.392.000
18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah [%]**	**%**	**100**	**5.268.164.699**
18.01.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun**	**Dokumen**	**3**	**3.783.000**
18.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	1	3.783.000
18.01.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah**	**bulan**	**12**	**3.190.649.009**
18.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	25	3.190.649.009
18.01.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**dokumen**	**1**	**76.900.000**
18.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut yang disediakan	paket	34	30.685.000
18.01.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	40	46.215.000
18.01.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**bulan**	**12**	**550.920.000**
18.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	42.108.000
18.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	6	219.230.000
18.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4	64.350.000
18.01.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	111.615.000

18.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	dokumen	1	7.992.000
18.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	25	75.000.000
18.01.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	15.600.000
18.01.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	15.025.000
18.01.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**jumlah laporan pengadaan barang milik daerah**	**laporan**	**2**	**192.161.000**
18.01.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	33.815.000
18.01.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	99.237.000
18.01.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	5	59.109.000
18.01.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Bulan**	**12**	**1.071.423.298**
18.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan menyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	4	5.500.000
18.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	471.272.000
18.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	105.978.298
18.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	488.673.000
18.01.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah**	**laporan**	**12**	**278.404.401**
18.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	54.150.000
18.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	12	111.217.000
18.01.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	56	18.521.000
18.01.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	unit	3	20.850.000
18.01.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	unit	1	34.915.000
18.01.09.10	Pemeliharaan/Rehabil it asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	unit	31	38.751.401
	Jumlah				**6.622.883.199**

TABEL 2.5

PERUBAHAN BELANJA ANGGARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun**	**%**	**40**	**211.237.000**
18.02.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah penyusunan peta potensi investasi**	**dokumen**	**2**	**211.237.000**
18.02.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	dokumen	1	88.839.000
18.02.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	dokumen	1	122.398.000
18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/ PMDN skala menengah/ besar**	**%**	**20**	**134.104.100**
18.03.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**jumlah even promosi**	**kali**	**2**	**134.104.100**
18.03.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	2	134.104.100
18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan**	Poin	83	**482.718.500**
18.04.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan**	**%**	**100**	**482.718.500**
18.04.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	1200	131.252.000
18.04.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang endapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan usaha	500	216.033.000
18.04.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	93	38.356.500
18.04.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Kegiatan usaha	150	97.077.000
18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM**	**%**	**10**	**386.000.000**
18.05.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal**	**%**	**100**	**386.000.000**
18.05.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	315	292.000.000
18.05.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan	Kegiatan	100	94.000.000

18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik**	**%**	**40**	**104.492.000**
18.06.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyediaan data informasi perizinan/ non perizinan**	**%**	**40**	**104.492.000**
18.06.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	1	104.492.000
18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah [%]**	**%**	**100**	**5.880.965.608**
18.01.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun**	**Dokumen**	**3**	**3.783.000**
18.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	1	3.783.000
18.01.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah**	**bulan**	**12**	**3.094.473.000**
18.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	25	3.094.473.000
18.01.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**dokumen**	**1**	**76.900.000**
18.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut yang disediakan	paket	34	30.685.000
18.01.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	40	46.215.000
18.01.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**bulan**	**12**	**982.290.620**
18.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	42.108.000
18.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	8	631.275.620
18.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4	64.350.000
18.01.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	105.865.000
18.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	dokumen	1	7.992.000
18.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	35	115.100.000
18.01.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	15.600.000
18.01.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**jumlah laporan pengadaan barang milik daerah**	**laporan**	**2**	**349.571.000**
18.01.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	33.815.000
18.01.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	229.215.000
18.01.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	5	86.541.000

18.01.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Bulan**	**12**	**1.024.807.298**
18.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan menyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	4	5.500.000
18.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	433.436.000
18.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	94.798.298
18.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	491.073.000
18.01.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah**	**laporan**	**12**	**349.140.690**
18.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	55.750.000
18.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	12	109.789.409
18.01.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	56	18.521.000
18.01.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	unit	3	20.850.000
18.01.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	unit	1	88.286.880
18.01.09.10	Pemeliharaan/Rehabil it asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	unit	31	55.943.401
					7.199.517.208

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kerangka Pengukuran Kinerja di Pemerintah Kabupaten Sragen dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun rumus pengukuran kinerja sebagai berikut:

1. Semakin besar realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus:

$$\%\ capaian\ kinerja = \frac{realisasi}{rencana} x100\%$$

2. Semakin besar realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk (negatif), maka digunakan rumus:

$$\%\ capaian\ kinerja = \frac{rencana - (realisasi - rencana)}{rencana} x\ 100\%$$

3. Untuk target indikator yang bersifat kumulatif dilakukan penghitungan pencapaian kinerja dengan rumus yang sama dengan poin 1:

$$\%\ capaian\ kinerja = \frac{realisasi}{rencana} x100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

TABEL 3.1

SKALA PENGUKURAN PENCAPAIANSASARAN KINERJA

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	75 % - 100 %	Baik
3	55 % - 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pengukuran tingkat capaian kinerja Tahun 2023 dilakukan dengan cara;

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023.

Pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2023 dengan realisasi pencapaiannya. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

TABEL 3.2

PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI TAHUN 2023

NO		TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN			
					TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)	KATEGORI
1		2	3	5	6	7	8	9
1		**Tujuan Strategis :** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Nilai realisasi penanaman modal	trilyun rupiah	1,55	2,2	142%	Sangat Baik
1	1	**Sasaran Strategis:** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/PMDN	investor	1.313	14.936	1.138%	Sangat Baik
1	2	**Sasaran Penunjang:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	predikat	BB (70,30)	BB (70,90)	101%	Sangat Baik

Pada tabel diatas dapat diketahui pencapaian target dari Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dengan kategori **Sangat Baik**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2023 **Sangat Baik**.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

TABEL 3.3

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN DUA TAHUN SEBELUMNYA

NO		TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATO RTUJUAN/ SASARAN	2021			2022			2023		
				TARGET	REA LISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	TARGET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA (%)	TARGET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1		Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomidaerah	Jumlah Nilai investasi	2,1	2,1	100	1,50	2,1	140	1,55	2,2	142
1	1	Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomidaerah	JumlahPMA/ PMDN	1.785	6.072	340	1.250	8770	702%	1.313	14936	1138

Pada tabel diatas adalah perbandingan capaian pada 3 (tiga) tahun terakhir pada level tujuan dan sasaran atau Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023. Apabila dilihat dari realisasi dan capaiannya sudah memenuhi target yang telah ditetapkan atau dengan kategori **Sangat Baik.**

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

TABEL 3.4

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

NO		TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET RENSTRA			
				TARGET TAHUN 2026	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT KEMAJUAN
1		Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai investasi	8	2,2	27,5	Akan tercapai
1	1	Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN	6.907	14.936	216,2	Melebihi Target

TABEL 3.5

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN RPJMD

NO		TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET RPJMD			
				TARGET TAHUN 2026	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT KEMAJUAN
1		Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai investasi	8	2,2	27,5	Akan tercapai
1	1	Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN	6.907	14.936	216,2	Melebihi Target

Dari 2 tabel tersebut di atas dapat diketahui perbandingan capaian IKU tahun 2023 dengan target akhir Renstra dan target akhir RPJMD tahun 2026, akan tercapai bahkan capaian kinerja diperkirakan melebihi target.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

TABEL 3.6

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN STANDAR NASIONAL

NO		TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	STANDAR NASIONAL		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1		Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhanekonomi daerah	Jumlah Nilai investasi (trilyun rupiah)	1.099,8	1.400	128
1	1	Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN (investor)	-	-	-

Dari tabel diatas dapat diketahui perbandingan capaian IKU tahun 2023 dengan target Nasional tahun 2023, bahwa sampai dengan tahun 2023 capaian kinerja lebih baik dibandingkan dengan capaian nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

TABEL 3.7

ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN

NO		TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TAHUN 2023			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KATEGORI
1		Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai investasi(trilyun rupiah)	1,55	2,2	142	Sangat Baik
1	1	Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN (investor)	1.313	14.936	1.138	Sangat Baik

Realisasi investasi tahun 2023 tersebar pada banyak sektor dengan sektor perdagangan/ jasa lebih mendominasi disusul sektor industri makanan. Adapun persebaran sektor investasi sebagai berikut;

TABEL 3.8

REALISASI INVESTASI TAHUN 2023

No	SEKTOR	JUMLAH		
		Proyek	Investasi	Naker
1	Tanaman Pangan, Perkebunan	1.649	83.005.950.000	2.491
2	Peternakan	338	22.040.500.000	611
3	Kehutanan	206	7.651.500.000	229
4	Perikanan	490	16.154.500.000	652
5	Pertambangan	27	12.487.235.000	121
6	Industri Makanan	2.740	255.674.240.008	7.145
7	Industri Tekstil	497	169.143.900.000	5.668
8	Industri kulit, Barang dari Kulit dan Alas Sepatu	6	226.000.000	30
9	Industri Kayu	86	6.897.200.000	249
10	Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Percetakan	52	4.137.500.000	115
11	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	59	30.243.800.000	194
12	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	50	140.262.090.000	562
13	Industri Mineral Non Logam	39	14.754.700.000	141
14	Industri Dasar Logam, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatanya	100	14.299.000.000	199
15	Industri Mesin, Elektronik, Peralatan Listrik, Instrumen Kedokteran dan Optik	74	2.716.735.000	164
16	Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	8	392.151.650	10
17	Industri Lainya	186	211.766.156.845	964
18	Listrik, Gas dan Air	93	14.440.833.338	239
19	Konstruksi	558	76.763.838.816	1.547
20	Perdagangan & Reparasi	4.750	406.328.443.859	10.663
21	Hotel dan Restoran	1.520	66.564.535.012	2.891
22	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	293	46.002.327.824	1.237
23	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	78	215.494.125.001	568
24	Jasa Lainnya	1.037	390.761.404.742	4.874
	JUMLAH TOTAL	**14.936**	**2.208.208.667.095**	**41.564**

Sumber data : DPMPTSP 2023

Faktor yang mempengaruhi peningkatan pencapaian kinerja realisiasi penanaman modal dan realisasi PMA/PMDN di Kabupaten Sragen antara lain;

a. Iklim investasi yang dinilai konsudif. Hal ini ditunjukkan meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun ke tahun. Tahun 2023 IKM atas layanan perizinan dan nonperizinan DPMPTSP menunjukkan angka 87,50 yang dapat dipersepsikan SANGAT BAIK.

b. Kemudahan dalam pengurusan perizinan berusaha melalui aplikasi pelayanan terpadu secara elektronik berbasis resiko (*Online Single Submission Risk Based Act*/OSS RBA). Melalui OSS RBA ini pemohon perizinan berusaha dapat langsung melakukan pengajuan perizinan. Surat izin bisa langsung terbit dan dicetak dari aplikasi OSS RBA. Hal ini sangat memudahkan bagi masyarakat. DPMPTSP hanya melakukan pendampingan apabila masyarakat mengalami kendala dalam proses pengajuan maupun dalam proses verifikasi. Bagi pelaku UMKM dan usaha dengan tingkat resiko rendah dan menengah rendah sangat mudah, sehingga cukup Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat melakukan kegiatan usaha. Kemudahan layanan perizinan tidak hanya melalui OSS RBA, namun dapat dilakukan melalui SIPIONER (Sistem Informasi Perizinan Online Sragen). Aplikasi ini dipakai sebagai pelayanan perizinan daerah dan perizinan yang tidak termuat dalam OSS RBA.
c. Penyediaan informasi layanan tata ruang melalui aplikasi SiPelangi (Sistem Informasi Peluang Investasi), dimana aplikasi tersebut memuat peluang investasi dan informasi peruntukan tata ruang. Hal ini sangat membantu bagi calon investor yang akan menanamkan modal di Kabupaten Sragen. Penerbitan melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) bagi UMKM serta bagi usaha dengan tingkat resiko rendah dan menengah rendah sangat mudah, sehingga cukup Nomor Induk Berusaha (NIB) sudah melakukan kegiatan usaha.
d. Layanan Bergerak DPMPTSP sebagai layanan *mobile* adalah layanan jemput bola bagi masyarakat yang akan mengajukan perizinan baik melalui OSS RBA maupun SIPIONER.
e. Bimbingan teknis kepada pelaku usaha yang dilaksanakan dimaksudkan sebagai media sosialisasi terhadap pelaku usaha tentang alur permohonan Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha untuk Mendukung Kegiatan Usaha.

Faktor tersebut di atas diyakini sangat berpengaruh atas pencapaian dan peningkatan kinerja **realisiasi penanaman modal** dan **realisasi PMA/PMDN** di Kabupaten Sragen.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses. Semakin hemat/ sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Tingkat efisiensi penggunaan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan sektor Penanaman Modal, terjadi pada beberapa pencapaian *outcome*, yang secara ringkas disajikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 3.9

EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2023

NO		TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KINERJA TAHUN 2023			ANGGARAN TAHUN 2023			TINGKAT EFISIENSI (%) (kolom 6 dibagi Kolom 9) Kurang dari 1% maka kurang efisien lebih dari 1% maka efisien	
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN(%)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai investasi (trilyun rupiah)	1,55	2,2	142	1.221.532.000	1.181.490.563	96,72	1,47	Efisien
1	1	Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN (investor)	1.313	14.936	1.138	1.221.532.000	1.181.490.563	96,72	11,77	Efisien
1	2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	70,30	70,90	101	5.880.965.608	5.671.801.188	96,44	1,05	Efisien

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya pada tahun 2023 sebagai berikut:

a. Pada indikator kinerja utama **Jumlah Nilai Investasi** tingkat efisiensinya adalah 1,47%. Pencapaian tersebut menunjukan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk **EFISIEN**.

b. Pada indikator kinerja utama **Jumlah PMA/PMDN** tingkat efisiensinya adalah 11,77%. Pencapaian tersebut menunjukan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk **EFISIEN**.

c. Pada indikator kinerja utama **Predikat Kinerja SAKIP** tingkat efisiensinya adalah 1,05%. Pencapaian tersebut menunjukan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk **EFISIEN**.

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberihasilan pencapaian kinerja

TABEL 3.10
ANALISIS PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA

NO					TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	KETERANGAN (MENDUKUNG/ TIDAK MENDUKUNG)
1					2	3	4	5	6	7	8
1					**Tujuan Strategis :** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai investasi (trilyun rupiah)	142				
1	1				**Sasaran Strategis :** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN (investor)	1.138				
2	18	2						**PROGRAM PENGEMBANGANIKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]**	**75,00**	Mendukung
2	18	2	01					Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	jumlah penyusunan peta potensi investasi [dokumen]	100,00	Mendukung
2	18	2	01	02				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota [Dokumen]	100,00	Mendukung
2	18	3	01					**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/ PMDN skala menengah/ besar [%]**	**196,45**	Mendukung

2	18	3	01	01				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah even promosi [kali]	100,00	Mendukung
2	18	3	01	02				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota [Dokumen]	100,00	Mendukung
2	18	4						**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan [poin]**	**105,42**	Mendukung
2	18	4	01					Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu SatuPintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]	100,00	Mendukung
2	18	4	01	01				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik [Pelaku Usaha]	201,25	Mendukung
2	18	4	01	02				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan NonPerizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal [Kegiatan Usaha]	211,20	Mendukung
2	18	4	01	03				Penyediaan Layanan Konsultasidan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PelayananTerpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap PelayananTerpadu Perizinan dan Non Perizinan [Orang]	222,22	Mendukung
2	18	4	01	04				Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah [Kegiatan Usaha]	140,00	Mendukung

2	18	5						**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]**	**584,20**	Mendukung
2	18	5	01					Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]	67,70	Mendukung
2	18	5	01	02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal [Pelaku Usaha]	100,00	Mendukung
2	18	5	01	03				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasidan Sinkronisasi Pengawasan [Kegiatan Usaha]	164,00	Mendukung
2	18	6						**PROGRAM PENGELOLAANDATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**	**100,00**	Mendukung
2	18	6	01					Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/ nonperizinan[%]	100,00	Mendukung
2	18	6	01	01				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha TerintegrasiSecara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen]	100,00	Mendukung
					Sasaran Penunjang: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	101%				Mendukung
2	18	1						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah [%]**	**100,00**	Mendukung

2	18	1	02					Administrasi KeuanganPerangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah [bulan]	100,00	Mendukung
2	18	1	02	01				Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]	96,00	Mendukung
2	18	1	05					Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [dokumen]	200,00	Mendukung
2	18	1	05	02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut [Paket]	91,18	Mendukung
2	18	1	06					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah [bulan]	100,00	Mendukung
2	18	1	06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	150,00	Mendukung
2	18	1	06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	137,50	Mendukung
2	18	1	06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	100,00	Mendukung
2	18	1	06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan [Paket]	50,00	Mendukung
2	18	1	06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undanganyang Disediakan [Dokumen]	100,00	Mendukung
2	18	1	06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	105,71	Mendukung
2	18	1	06	10				Penatausahaan Arsip Dinamispada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	100,00	Mendukung
2	18	1	07					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]	150,00	Mendukung

2	18	1	07	05				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	150,00	Mendukung
2	18	1	07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan [unit]	100,00	Mendukung
2	18	1	08					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]	100,00	Mendukung
2	18	1	08	01				Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat [Laporan]	100,00	Mendukung
2	18	1	08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	100,00	Mendukung
2	18	1	08	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	100,00	Mendukung
2	18	1	08	04				Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	100,00	Mendukung
2	18	1	09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]	100,00	Mendukung
2	18	1	09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya [Unit]	100,00	Mendukung
2	18	1	09	05				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	100,00	Mendukung
2	18	1	09	10				Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]	100,00	Mendukung

Pencapaian tujuan dan indikator tujuan didukung oleh 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) sasaran penunjang yaitu:

a. **Sasaran Strategis**

   Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dengan indikator **Jumlah PMA/PMDN** (investor);

b. **Sasaran Penunjang**

   Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator **Predikat kinerja SAKIP Perangkat Daerah**

Sasaran strategis **Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah** dengan indikator kinerja **Jumlah PMA/PMDN** (investor) dengan capaian kinerja adalah 1.138%, Kategori **Sangat Baik**. Sasaran strategis ini didukung oleh sejumlah Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yaitu:

TABEL 3.11

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN

YANG MENDUKUNG SASARAN STRATEGIS

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Realisasi
1	2	3	4
18.2	**PROGRAM PENGEMBANGANIKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]**	**75,00**
18.2.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	jumlah penyusunan peta potensiinvestasi	100,00
18.2.2.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi danPeluang Usaha Kabupaten/Kota	100,00
18.3	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/ besar [%]**	**196,45**
18.3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah even promosi	100,00
18.3.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	100,00
18.4	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan MasyarakatBidang Perizinan dan Nonperizinan [poin]**	**105,42**

18.4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standarpelayanan	100,00
18.4.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasisecara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan TerpaduPerizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	201,25
18.4.1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan NonPerizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari PelakuUsaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	211,20
18.4.1.3	Penyediaan Layanan Konsultasidan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PelayananTerpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang MemperolehLayanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap PelayananTerpadu Perizinan dan NonPerizinan	222,22
18.4.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari PelakuUsaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ InsentifDaerah	140,00
18.5	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelakuusaha yang menyampaikan LKPM [%]**	**584,20**
18.5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pengendalianpelaksanaan penanaman modal	67,70
18.5.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	100,00
18.5.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari PelakuUsaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	164,00
18.6	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**	**100,00**
18.6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan	100,00

18.6.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasisecara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha TerintegrasiSecara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	100,00

Dari program/kegiatan/subkegiatan tersebut capaian kinerjanya semuanya 100% atau lebih kecuali ;

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (**75,00%**).
2. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (67,7%)

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sasaran strategis **Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah** adalah:

1. Peningkatan realisasi penanaman modal berbanding lurus denganjumlah investor yang menanamkan modal di Kabupaten Sragen. Dengan kemudahan dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, maka mampu mendorong meningkatnya jumlah PMA/PMDN.
2. Pelaksanaan program Promosi Penanaman Modal yang memuat salah satu program unggulan peningkatan UMKM telah memacu peningkatan jumlah PMDN terutama pada sektor UMKM. Salah satu kegiatan promosi penanaman yang dilakukan melalui CJIBF telah memacu peningkatan jumlah kepeminatan realisasi investasi pada skala menengah besar. Hal ini terbukti dengan jumlah realisasi kepeminatan penanaman modal sebesar 41%.
3. Program Pelayanan Penanaman Modal juga sangat berperan dalam peningkatan realisasi penanaman modal. Program ini menitik beratkan pada pelayananpelayanan perizinan berusaha dan nonberusaha secara elektronika (*online*). Dengan Pelayanan yang baik serta kemudahan dalam perizinan berbasis resiko (OSS RBA), maka berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penanaman modal.

Sasaran **Penunjang Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah** dengan indikator kinerja **Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah** Capaian kinerjanya adalah **101%** Kategori **Sangat Baik**. Sasaran ini didukung oleh sejumlah program/kegiatan/subkegiatan yaitu:

TABEL 3.12

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN

YANG MENDUKUNG SASARAN PENUNJANG

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Capaian (%)
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah [%]**	**100**
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuanganperangkat daerah [bulan]	100,00
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]	96,00
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaanadministrasi kepegawaian perangkat daerah [dokumen]	200,00
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian DinasBeserta Atribut [Paket]	91,18
2.18.01.2.06	Administrasi UmumPerangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umumperangkat daerah [bulan]	100,00
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PenerangBangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	150,00
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	137,50
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	100,00
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan [Paket]	100,00
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaandan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan [Dokumen]	100,00
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	105,71
2.18.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen PenatausahaanArsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	100,00
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	jumlah laporan pengadaan barangmilik daerah [laporan]	150,00

2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yangDisediakan [paket]	150,00
2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan[unit]	100,00
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusanpemerintahan daerah [bulan]	100,00
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat [Laporan]	100,00
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan [Laporan]	100,00
2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan [Laporan]	100,00
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	100,00
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]	100,00
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya [Unit]	100,00
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya [Unit]	100,00
2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara[Unit]	100,00
2.18.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit]	100,00
2.18.01.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	100,00
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]	100,00

Program/kegiatan/subkegiatan tersebut capaian kinerja semua 100% atau lebih, kecuali;

1. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (96%), jumlah PNS berkurang dikarenakan pensiun dan jabatan Kepala Dinas selama 6 (enam) bulan dijabat Pelaksana tugas (Plt)
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (91 %), bahwa jumlah paket pengadaan pakaian dinas sehari-hari hanya diberikan kepadapegawai/aparatur PNS dan petugas pelayanan.

B. REALISASI ANGGARAN

Belanja yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Realisasi Anggaran Belanja

   Belanja yang direncanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 7.199.517.208 yang meliputi;

   a. Belanja Operasi **Rp. 6.252.518.290,-**
      - Belanja Pegawai Rp. 3.094.473.000,-
      - Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.691.362.290,-

   b. Belanja Modal **Rp. 946.998.918,-**
      - Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 846.998.918,-
      - Belanja Modal *Software* (Aplikasi) Rp. 100.000.000,-

   Realisasi Belanja yang dapat diwujudkan adalah sebesar Rp. 6.977.821.295 (96,92%). Berdasarkan perbandingan antara Rencana dan Realisasi Belanja yang dapat diwujudkan maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen adalah sebesar **96,92%.**

2. Realisasi Anggaran Belanja yang mendukung secara langsung IKU

   Pada tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen terdapat 5 program yang mendukung secara langsung IKU Perangkat Daerah yaitu:

   a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

      Progam tersebut direncanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 122.398.000,-. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 122.152.400,-. Berdasarkan perbandingan antara rencana dan realisasi yang dapat diwujudkan maka dapat

disimpulkan bahwa capaian anggaran yang mendukung secara langsung sasaran strategis adalah sebesar **100%.**

b. Program Promosi Penanaman Modal

Progam tersebut direncanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 141.240.500,-. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 132.038.744,-. Berdasarkan perbandingan antara rencana dan realisasi yang dapat diwujudkan maka dapat disimpulkan bahwa capaian anggaran yang mendukung secara langsung sasaran strategis adalah sebesar **98%.**

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Progam tersebut direncanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. **482.718.500**,-. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. **478.235.963,-.** Berdasarkan perbandingan antara rencana dan realisasi yang dapat diwujudkan maka dapat disimpulkan bahwa capaian anggaran yang mendukung secara langsung sasaran strategis adalah sebesar **99%.**

d. Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal

Progam tersebut direncanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. **386.000.000**,-. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 384.239.500,- Berdasarkan perbandingan antara rencana dan realisasi yang dapat diwujudkan maka dapat disimpulkan bahwa capaian anggaran yang mendukung secara langsung sasaran strategis adalah sebesar **100%.**

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Progam tersebut direncanakan Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp.104.492.000,-. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 101.450.000,- Berdasarkanperbandingan antara rencana dan realisasi yang dapat diwujudkan maka dapat disimpulkan bahwa capaian anggaran yang mendukung secaralangsung sasaran strategis adalah sebesar **97%.**

3. Realisasi Anggaran Belanja yang tidak mendukung secara langsung IKU

Pada tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen terdapat 1 program yang tidak mendukung secara langsung IKU yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dimana Progam tersebut

direncanakan pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 5.880.965.608,-. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 5.671.801.188,-. Berdasarkan perbandingan antara rencana dan realisasi yang dapat diwujudkan maka dapat disimpulkan bahwa capaian anggaran yang tidak mendukung secara langsung sasaran strategis adalah sebesar **96,44 %.**

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan serangkaian prosedur pengelolaan anggaran hingga realisasinya dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas/pertanggung jawaban atas dana yang telah dianggarkan pada perangkat daerah. Entitas Akuntansi dan Entitas pelaporan meliputi proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan APBD. Hal tersebut adalah merupakan data yang diolah untuk dijadikan suatu informasi guna pengambilan keputusan dan juga sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan juga sebagai pedoman dalam penyusunananggaran pendapatan dan belanja tahun berikutnya.

Pencapaian terhadap target sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen yang telah diraih selama tahun 2023 serta permasalahan yang sudah dihadapi, diharapkan dapat menjadi suatu acuan untuk merumuskan kebijakan strategis untuk tahun yang akan datang.

Dengan memperhatikan uraian dan data pada Bab III, maka dapat disampaikan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dinyatakan berhasil, karena hampir semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dicapai dengan kategori **Sangat Baik**. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

1. Capaian kinerja Tujuan 1: Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, tercapai **142 %** atau dengan kategori **Sangat Baik**;
2. Capaian kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah tercapai sebesar **1.138 %** atau dengan kategori **Sangat Baik**;
3. Capaian kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, tercapai sebesar **101 %** atau dengan kategori Sangat **Baik**

B. REKOMENDASI

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2023, terdapat beberapa rencana strategis yang dirancang untuk mencapai target kinerja pada tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

a. Penguatan dalam pencapaian realisasi penanaman modal dan PMA/PMD dengan pemberian kemudahan layanan perizinan berusaha.
b. Peningkatan kualitas realisasi penanaman modal dan PMA/PMD yang diharpkan mampu memberikan dampak positif pada dunia usaha dan perekonomian khusunya di Kabupaten Sragen.
c. Peningkatan kualitas kajian sektor investasi dengan harapan menjadi pedoman bagi calon investor yang akan melakukan investasi.
d. Peningkatan kualitas promosi investasi melalui penyebran informasi potensi investasi, forum investasi, serta pameran dengan harapan mampu menjadi daya tarik calon investor.
e. Peningkatan kualitas layanan investasi dan perizinan berusaha serta pendampingan kepada calon investor, sehingga iklim investasi yang kondusif tetap terjaga.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN



DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19791225 199810 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Soetomo No.5 Telp.0271-892348 (hunting), Fax 0271-894433 Website http://dpmptsp.sragenkab.go.id/, E-mail dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 0863 / 61 /18/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELANGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan datakinerja, dan pelaporan kinerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen, perlu menetapkan Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

a. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;
c. mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja;

d. melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/ dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
e. menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku; dan
f. menyampaikan dokumen sebagaimana tersebut pada huruf e di atas kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sragen
Pada tanggal : 05-01-2024.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19791225 199810 1 001

Salinan disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Sragen;
2. Kepala Baperida Kabupaten Sragen;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sragen
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sragen;
5. Kepala Bagian Organisasi
6. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 052/ 6 /18/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA SISTEMAKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN2024

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dwi Agus Prasetyo, S.STP, M.Si	Kepala	Penanggung jawab
2.	Yulius David Supriyadi, S.Sos, M.M	Sekretaris	Ketua
3.	Arif Bahtiar Rifai, SE	Perencana Ahli Muda/ Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Erwan Adhitya Suddin, SH, MM	Analis Kebijakan Ahli Madya/ Koordinator Penanaman Modal	Anggota
5.	Ilham Kurniawan, ST, MM	Analis Hukum Ahli Madya/ Koordinator pelayanan terpadu satu pintu	Anggota
6.	Suharpadmi, SH	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan / Ketua Tim Kerja Keuangan	Anggota
7.	Dra. Ekowati Yuli Widyaningsih, M.Si	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Maya Widiyarti, S.Kom, M.Si	Analis Kebijakan Ahli Muda/ Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pelaksanaan	Anggota
9.	Yustina Nugrahaeni, SS	Analis Hukum Ahli Muda/ Ketua Tim Kerja Informasi dan Pengolahan Data	Anggota
10.	Sri Umiyarsi, SE	Analis Kebijakan Ahli Muda/ Ketua Tim Kerja Pengembangan	Anggota

11.	Atikah Yuliana, SS	Analis Kebijakan Ahli Muda/ Ketua Tim Kerja Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal	Anggota
12.	Ariyanto, SE	Analis Hukum Ahli Muda/ Ketua Tim Kerja Pelayanan Perizinan dan nonperizinan	Anggota
13.	Ratih Poespitowati, SE	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
14.	Yuliananto Doni Pramukti, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
15.	Risna Nurdiana, SE	Analis Dokumen Perizinan	Anggota
16.	Oktavia Nila Permata, S.Sos	Analis Penanaman Modal	Anggota
17.	Sugianto, SE	Analis Jabatan	Anggota
18.	Rina Savista Dwi Astuty, SM	Pengawas Penanaman Modal	Anggota
19.	Nasrun Nugroho, A.Md	Pranata Komputer Terampil	Anggota

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19791225 199810 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Soetomo No.5 Telp.0271-892348 (hunting), Fax 0271-894433 Website http://dpmptsp.sragenkab.go.id/, E-mail dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 052/ 62 /18/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pelaporan kinerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Sragen, perlu menetapkan Tim Penyusun Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tahun 2023;

Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten SragenNomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah padaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

a. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja;
c. mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja;
d. melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/ dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
e. menyusun dokumen Laporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku; dan

f. menyampaikan dokumen sebagaimana tersebut pada huruf e di atas kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sragen
Pada tanggal : 05-01-2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19791225 199810 1 001

Salinan disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Sragen;
2. Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Sragen;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sragen
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sragen;
5. Kepala Bagian Organisasi
6. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 052/ 62 /18/2024 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dwi Agus Prasetyo, S.STP, M.Si	Kepala	Penanggung jawab
2.	Yulius David Supriyadi, S.Sos, M.M	Sekretaris	Ketua
3.	Arif Bahtiar Rifai, SE	Perencana Ahli Muda/ Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Erwan Adhitya Suddin, SH, MM	Analis Kebijakan Ahli Madya/ Koordinator Penanaman Modal	Anggota
5.	Ilham Kurniawan, ST, MM	Analis Hukum Ahli Madya/ Koordinator pelayanan terpadu satu pintu	Anggota
6.	Suharpadmi, SH	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan / Ketua Tim Kerja Keuangan	Anggota
7.	Dra. Ekowati Yuli Widyaningsih, M.Si	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Maya Widiyarti, S.Kom, M.Si	Analis Kebijakan Ahli Muda/ Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pelaksanaan	Anggota
9.	Yustina Nugrahaeni, SS	Analis Hukum Ahli Muda/ Ketua Tim Kerja Informasi dan Pengolahan Data	Anggota
10.	Sri Umiyarsi, SE	Analis Kebijakan Ahli Muda/ Ketua Tim Kerja Pengembangan	Anggota

11.	Atikah Yuliana, SS	Analis Kebijakan Ahli Muda/ Ketua Tim Kerja Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal	Anggota
12.	Ariyanto, SE	Analis Hukum Ahli Muda/ Ketua Tim Kerja Pelayanan Perizinan dan nonperizinan	Anggota
13.	Ratih Poespitowati, SE	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
14.	Risna Nurdiana, SE	Analis Dokumen Perizinan	Anggota
15.	Rina Savista Dwi Astuty, SM	Pengawas Penanaman Modal	Anggota
16.	Nasrun Nugroho, A.Md	Pranata Komputer Terampil	Anggota

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19791225 199810 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. dr. Sutomo No.5 Telp.0271-892348 (hunting), Fax 0271-894433

Website http://dpmptsp.sragenkab.go.id/, E-mail dpmptsp@sragenkab.go.id

S R A G E N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 052/ 38 /18/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang

a. bahwa untuk kelancaran dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja,p engelolaan data kinerja dan pelaporan kinerja perlu dibentuk tim evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pembentukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tahun 2023;

Mengingat

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;
12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;
13. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

a. Menghimpun dan mengolah data dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
b. mengumpulkan dan menganalisa data dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
c. melaksanakan pengukuran kinerja dan penilaian kinerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
d. mengkoordinasikan dan mengkonfirmasi hasil pengukuran dan penilaian kinerja;

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 02-01-2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

TUGIYONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670708 199303 1 010

Salinan disampaikan kepada Yth.
1. Kepala Baperida Kabupaten Sragen;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sragen
3. Kepala Bagian Organisasi
4. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 052/ /29/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Tugiyono, SH	Plt.Kepala	Penanggung jawab
2.	Suharti, SKM, M.Kes	Sekretaris	Ketua
3.	Arif Bahtiar Rifai, SE	Perencana Ahli Muda/ Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Erwan Adhitya Suddin, SH, MM	Analis Kebijakan Ahli Madya/ Koordinator Penanaman Modal	Anggota
5.	Ilham Kurniawan, ST, MM	Analis Hukum Ahli Madya/ Koordinator pelayanan terpadu satu pintu	Anggota
6.	Ning Setyowati, SE	Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Muda/ Subkoordinator Keuangan	Anggota
7.	Dra. Ekowati Yuli Widyaningsih, M.Si	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Ratih Poespitowati, SE	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
9.	Suharpadmi, SH	Penyusun Anggaran dan Pelaporan	Anggota
10.	Nasrun Nugroho, A.Md	Pelaksana	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PM PTSP

TUGIYONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670708 199303 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	TUGIYONO, S.H.
Jabatan	:	PLT. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama	:	dr.Hj.KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI
Jabatan	:	BUPATI SRAGEN

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II	PIHAK I
dr.Hj.KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI	**TUGIYONO, S.H.**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	TUJUAN/ SASARAN KINERJA/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/PMDN (trilyun rupiah)	1,55 Trilyun Rupiah
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah (predikat)	BB (70,30) Predikat
3	Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/PMDN (investor)	1313 investor

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5.364.340.708	DAU
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	211.237.000	DAU
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	141.240.500	DAU
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	507.849.000	DAU
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	386.000.000	DAK NON FISIK
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	108.392.000	DAU

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II

dr.Hj.KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

PIHAK I

TUGIYONO, S.H.

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TUGIYONO, S.H.

Jabatan : PLT. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : dr.Hj.KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Jabatan : BUPATI SRAGEN

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II	PIHAK I
dr.Hj.KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI	**TUGIYONO, S.H.**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	TUJUAN/ SASARAN KINERJA/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/PMDN (trilyun rupiah)	1,55 Trilyun Rupiah
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah (predikat)	BB (70,30) Predikat
3	Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/PMDN (investor)	1313 investor

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5.364.340.708	DAU
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	211.237.000	DAU
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	141.240.500	DAU
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	507.849.000	DAU
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	386.000.000	DAK NON FISIK
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	108.392.000	DAU

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II

dr.Hj.KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

PIHAK I

TUGIYONO, S.H.

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	SUHARTI, S.K.M.,M.Kes.
Jabatan	:	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama	:	TUGIYONO, S.H.
Jabatan	:	PLT.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II	PIHAK I
TUGIYONO, S.H.	**SUHARTI, S.K.M.,M.Kes.**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	3 Dokumen
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan
3	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	2 Laporan
4	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan
5	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah	2 Laporan
6	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan
7	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.783.000	DAU
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.190.649.009	DAU
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76.900.000	DAU
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	550.920.000	DAU
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	192.261.000	DAU

7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	278.404.401	DAU

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II	PIHAK I
TUGIYONO, S.H.	**SUHARTI, S.K.M.,M.Kes.**

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIF BAHTIAR RIFAI, S.E.

Jabatan : JF Perencana Ahli Muda

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : SUHARTI, S.K.M.,M.Kes.

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II	PIHAK I
SUHARTI, S.K.M.,M.Kes.	**ARIF BAHTIAR RIFAI, S.E.**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
2	Terlaksananya Koordinasi danPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Koordinasi danPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.783.000	DAU

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II	PIHAK I
SUHARTI, S.K.M.,M.Kes.	**ARIF BAHTIAR RIFAI, S.E.**

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NING SETYOWATI, S.E.

Jabatan : JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : SUHARTI, S.K.M.,M.Kes.

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II	PIHAK I
SUHARTI, S.K.M.,M.Kes.	**NING SETYOWATI, S.E.**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang / Bulan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.190.649.009	DAU

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II

SUHARTI, S.K.M.,M.Kes.

PIHAK I

NING SETYOWATI, S.E.

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. EKOWATI YULI WIDYANINGSIH, M.Si.

Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : SUHARTI, S.K.M.,M.Kes.

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II	PIHAK I
SUHARTI, S.K.M.,M.Kes.	**Dra. EKOWATI YULI WIDYANINGSIH, M.Si.**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	38 Paket
2	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang
3	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
4	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket
5	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
6	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Paket
7	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan	1 Dokumen
8	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan
9	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen
10	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 Dokumen
11	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan	1 Unit
12	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket

13	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	28 Unit
14	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
15	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan
16	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan
17	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan
18	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit
19	Terlaksananya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit
20	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	96 Unit
21	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap L:ainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 Unit
22	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit
23	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	47 Unit

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.685.000	DAU
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	46.215.000	DAU

3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42.108.000	DAU
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	219.230.000	DAU
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.350.000	DAU
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	111.615.000	DAU
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	7.992.000	DAU
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000	DAU
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.600.000	DAU
10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15.025.000	DAU
11	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.815.000	DAU
12	Pengadaan Mebel	99.337.000	DAU
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.109.000	DAU
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000	DAU
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	471.272.000	DAU
16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.978.298	DAU
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	488.673.000	DAU
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.150.000	DAU
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.217.000	DAU
20	Pemeliharaan Mebel	18.521.000	DAU
21	Pemeliharaan Aset Tetap L:ainnya	20.850.000	DAU
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	34.915.000	DAU

23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	38.751.401	DAU

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II	PIHAK I
SUHARTI, S.K.M.,M.Kes.	**Dra. EKOWATI YULI WIDYANINGSIH, M.Si.**

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.
Jabatan	:	JF Analis Hukum Ahli Madya

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama	:	TUGIYONO, S.H.
Jabatan	:	PLT.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II	PIHAK I
TUGIYONO, S.H.	**ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan	100 Prosen
2	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/ nonperizinan	40 Prosen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	507.849.000	DAU
2	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	108.392.000	DAU

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II

TUGIYONO, S.H.

PIHAK I

ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUSTINA NUGRAHAENI, S.S.

Jabatan : JF Analis Hukum Ahli Muda

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.

Jabatan : JF Analis Hukum Ahli Madya

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II	PIHAK I
ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.	**YUSTINA NUGRAHAENI, S.S.**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah aplikasi Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 DOKUMEN

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	108.392.000	DAU

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II

ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.

PIHAK I

YUSTINA NUGRAHAENI, S.S.

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIYANTO, S.E.

Jabatan : JF Analis Hukum Ahli Muda

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.

Jabatan : JF Analis Hukum Ahli Madya

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II	PIHAK I
ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.	**ARIYANTO, S.E.**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1250 Pelaku Usaha
2	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	150 Kegiatan Usaha

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	131.252.000	DAU
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	97.077.000	DAU

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II	PIHAK I
ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.	**ARIYANTO, S.E.**

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUHARI, S.H.

Jabatan : JF Analis Hukum Ahli Muda

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.

Jabatan : JF Analis Hukum Ahli Madya

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II	PIHAK I
ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.	**SUHARI, S.H.**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	500 Kegiatan Usaha
2	Terlaksananya Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	80 orang

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	216.033.000	DAU
2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	63.487.000	DAU

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II

ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.

PIHAK I

SUHARI, S.H.

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	ERWAN ADHITYA SUDDIN, S.H.,M.M.
Jabatan	:	JF Analis Kebijakan Madya

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama	:	TUGIYONO, S.H.
Jabatan	:	PLT. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II	PIHAK I
TUGIYONO, S.H.	**ERWAN ADHITYA SUDDIN, S.H.,M.M.**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Teraksananya Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	jumlah penyusunan peta potensi investasi	2 Dokumen
2	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah even promosi	2 Kali
3	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100 Persen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	211.237.000	DAU
2	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	141.240.500	DAU
3	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	386.000.000	DAK NON FISIK

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II

TUGIYONO, S.H.

PIHAK I

ERWAN ADHITYA SUDDIN, S.H.,M.M.

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI UMIYARSI, S.E.

Jabatan : JF Analis Kebijakan Muda

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : ERWAN ADHITYA SUDDIN, S.H.,M.M.

Jabatan : JF Analis Kebijakan Madya

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II	PIHAK I
ERWAN ADHITYA SUDDIN, S.H.,M.M.	**SRI UMIYARSI, S.E.**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	1 Dokumen
2	Terlaksananya Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota	88.839.000	DAU
2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	122.398.000	DAU

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II

ERWAN ADHITYA SUDDIN, S.H.,M.M.

PIHAK I

SRI UMIYARSI, S.E.

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAYA WIDIARTI, S.Kom.,M.Si.

Jabatan : JF Analis Kebijakan Muda

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : ERWAN ADHITYA SUDDIN, S.H.,M.M.

Jabatan : JF Analis Kebijakan Madya

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II	PIHAK I
ERWAN ADHITYA SUDDIN, S.H.,M.M.	**MAYA WIDIARTI, S.Kom.,M.Si.**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	2 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	141.240.500	DAU

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II

ERWAN ADHITYA SUDDIN, S.H.,M.M.

PIHAK I

MAYA WIDIARTI, S.Kom.,M.Si.

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ATIKAH YULIANA, S.S.

Jabatan : JF Analis Kebijakan Muda

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : ERWAN ADHITYA SUDDIN, S.H.,M.M.

Jabatan : JF Analis Kebijakan Madya

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II	PIHAK I
ERWAN ADHITYA SUDDIN, S.H.,M.M.	**ATIKAH YULIANA, S.S.**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	60 Kegiatan Usaha
2	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	150 Pelaku usaha
3	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal	100 Kegiatan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	54.000.000	DAK NONFISIK
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	238.000.000	DAK NONFISIK
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	94.000.000	DAK NONFISIK

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II

ERWAN ADHITYA SUDDIN, S.H.,M.M.

PIHAK I

ATIKAH YULIANA, S.S.

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RATIH POESPITOWATI, S.E.

Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : NING SETYOWATI, S.E.

Jabatan : JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II	PIHAK I
NING SETYOWATI, S.E.	RATIH POESPITOWATI, S.E.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mengumpulkan bahan, materi, dan data yang digunakan untuk kegiatan penyusunan laporan keuangan.	Dokumen bahan, materi, dan data penyusunan laporan keuangan.	12 Dokumen
2	Meneliti, mengklasifikasikan, dan mengolah bahan, materi, dan data penyusunan laporan keuangan.	Dokumen bahan, materi, dan data hasil penelitian, klasifikasi dan pengolahan.	12 Dokumen
3	Melakukan penyusunan data dan dokumen laporan keuangan sesuai petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku.	Dokumen laporan dan hasil penyusunan Laporan Keuangan.	12 Dokumen
4	Meneliti, mendiskusikan, dan memperbaiki hasil penyusunan data dan dokumen laporan keuangan.	Dokumen perbaikan hasil penyusunan data dan dokumen laporan keuangan.	12 Dokumen
5	Menyusun data dan dokumen laporan keuangan serta memintakan pengesahan dari pejabat yang berwenang.	Data dan dokumen hasil penyusunan Laporan Keuangan yang telah disahkan.	12 Dokumen
6	Menyiapkan dan menyusun data dan dokumen kegiatan - kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi - sesuai tugas jabatan.	Data dan dokumen kegiatan - kegiatan -.	48 Dokumen
7	Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.	Laporan Kinerja/pelaksanaan tugas.	12 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	0	-

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II	PIHAK I
NING SETYOWATI, S.E.	RATIH POESPITOWATI, S.E.

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUGIANTO, S.E.

Jabatan : Analis Jabatan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : Dra. EKOWATI YULI WIDYANINGSIH, M.Si.

Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II	PIHAK I
Dra. EKOWATI YULI WIDYANINGSIH, M.Si.	**SUGIANTO, S.E.**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mempersiapkan bahan dan konsep untuk pelaksanaan kegiatan analisis di bidang jabatan.	Dokumen bahan dan konsep untuk pelaksanaan kegiatan analisis di bidang jabatan.	12 Dokumen
2	Melaksanakan pengumpulan data dengan mengkaji data primer dan sekunder melalui kuesioner, wawancara, verifikasi dan klarifikasi di lapangan untuk memperoleh informasi yang akurat terkait dengan jabatan.	Dokumen data primer dan sekunder.	12 Dokumen
3	Menyiapkan bahan tindak lanjut berupa rekomendasi hasil analisis dengan menginventarisasi permasalahan yang terkait bidang tugas sebagai bahan kebijakan pimpinan.	Dokumen rekomendasi hasil analisis dan data permasalahan yang terkait bidang tugas jabatan.	12 Dokumen
4	Melaksanakan penyiapan dan penyusunan dokumen, bahan, dan materi kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi unit kerjanya.	Dokumen, bahan, dan materi kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi unit kerja.	48 Dokumen
5	Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.	Laporan Kinerja/pelaksanaan tugas.	12 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	0	-

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II	PIHAK I
Dra. EKOWATI YULI WIDYANINGSIH, M.Si.	SUGIANTO, S.E.

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUHARPADMI, S.H.

Jabatan : Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : ARIF BAHTIAR RIFAI, S.E.

Jabatan : JF Perencana Ahli Muda

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II	PIHAK I
ARIF BAHTIAR RIFAI, S.E.	**SUHARPADMI, S.H.**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mengumpulkan bahan, materi, dan data yang digunakan untuk kegiatan penyusunan program anggaran dan pelaporan.	Dokumen bahan, materi, dan data penyusunan program anggaran dan pelaporan.	12 Dokumen
2	Meneliti, mengklasifikasikan, dan mengolah bahan, materi, dan data penyusunan program anggaran dan pelaporan.	Dokumen bahan, materi, dan data hasil penelitian, klasifikasi dan pengolahan.	12 Dokumen
3	Melakukan penyusunan data dan dokumen program anggaran dan pelaporan sesuai petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku.	Dokumen laporan dan hasil penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan.	12 Dokumen
4	Meneliti, mendiskusikan, dan memperbaiki hasil penyusunan data dan dokumen program anggaran dan pelaporan.	Dokumen perbaikan hasil penyusunan data dan dokumen program anggaran dan pelaporan.	12 Dokumen
5	Menyusun data dan dokumen program anggaran dan pelaporan serta memintakan pengesahan dari pejabat yang berwenang.	Data dan dokumen hasil penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan yang telah disahkan.	12 Dokumen
6	Menyiapkan dan menyusun data dan dokumen kegiatan - kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi - sesuai tugas jabatan.	Data dan dokumen kegiatan - kegiatan -.	48 Dokumen
7	Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.	Laporan Kinerja/pelaksanaan tugas.	12 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	0	-

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II	PIHAK I
ARIF BAHTIAR RIFAI, S.E.	SUHARPADMI, S.H.

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NASRUN NUGROHO, A.Md.

Jabatan : JF Pranata Komputer Terampil

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : ARIF BAHTIAR RIFAI, S.E.

Jabatan : JF Perencana Ahli Muda

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II	PIHAK I
ARIF BAHTIAR RIFAI, S.E.	**NASRUN NUGROHO, A.Md.**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Melakukan penggandaan data.	Dokumen perencanaan kegiatan perencanaan, analisis, perancangan, impelementasi, pengembangan dan atau operasional sistem informasi berbasis komputer	12 Dokumen
2	Melakukan pemasangan kabel untuk infrastruktur teknologi informasi.	Dokumen dan laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan, analisis, perancangan, impelementasi, pengembangan dan atau operasional sistem informasi berbasis komputer sesuai rincian tugas jabatan.	12 Dokumen
3	Melakukan pemeliharaan perangkat teknologi informasi end user.	Dokumen dan data bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan, analisis, perancangan, impelementasi, pengembangan dan atau operasional sistem informasi berbasis komputer	12 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	0	-

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II	PIHAK I
ARIF BAHTIAR RIFAI, S.E.	NASRUN NUGROHO, A.Md.

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULIANANTO DONI P, S.Kom.

Jabatan : JF Pranata Komputer Ahli Muda

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : SUHARTI, S.K.M.,M.Kes.

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II	PIHAK I
SUHARTI, S.K.M.,M.Kes.	**YULIANANTO DONI P, S.Kom.**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersusun rencana studi kelayakan pengolahan data.	Dokumen perencanaan kegiatan perencanaan, analisis, perancangan, impelementasi, pengembangan dan atau operasional sistem informasi berbasis komputer	1 Dokumen
2	Membuat rancangan sitem informasi.	Dokumen perencanaan kegiatan perencanaan, analisis, perancangan, impelementasi, pengembangan dan atau operasional sistem informasi berbasis komputer.	1 Dokumen
3	Membuat spesifikasi teknis sistem komputer.	Dokumen dan data bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan, analisis, perancangan, impelementasi, pengembangan dan atau operasional sistem informasi berbasis komputer	1 Dokumen
4	Mengembangkan sistem database.	Dokumen rencana pengembangan kegiatan perencanaan, analisis, perancangan, impelementasi, pengembangan dan atau operasional sistem informasi berbasis komputer.	1 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	0	-

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II

SUHARTI, S.K.M.,M.Kes.

PIHAK I

YULIANANTO DONI P, S.Kom.

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email :
dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENING BUDIASTUTI, S.H.

Jabatan : Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : SUHARI, S.H.

Jabatan : JF Analis Hukum Ahli Muda

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II	PIHAK I
SUHARI, S.H.	ENING BUDIASTUTI, S.H.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mempersiapkan bahan dan konsep untuk pelaksanaan kegiatan analisis di bidang Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat.	Dokumen bahan dan konsep untuk pelaksanaan kegiatan analisis di bidang hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat.	12 Dokumen
2	Melaksanakan pengumpulan data dengan mengkaji data primer dan sekunder melalui kuesioner, wawancara, verifikasi dan klarifikasi di lapangan untuk memperoleh informasi yang akurat terkait dengan Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat.	Dokumen data primer dan sekunder.	12 Dokumen
3	Melaksanakan pengolahan data dengan menyusun berbagai bentuk cakupan informasi dengan menggunakan hasil-hasil yang diperoleh dari pengumpulan data.	Dokumen dan data hasil pengolahan data.	12 Dokumen
4	Menyiapkan bahan tindak lanjut berupa rekomendasi hasil analisis dengan menginventarisasi permasalahan yang terkait bidang tugas sebagai bahan kebijakan pimpinan.	Dokumen rekomendasi hasil analisis dan data permasalahan yang terkait bidang tugas hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat.	12 Dokumen
5	Menyimpan dokumen berupa file soft copy dan fisik hasil pengolahan data.	Laporan penyimpanan file soft copy dan fisik hasil pengolahan data.	12 Dokumen
6	Melaksanakan penyiapan dan penyusunan dokumen, bahan, dan materi kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi unit kerjanya.	Dokumen, bahan, dan materi kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi unit kerja.	48 Dokumen

7	Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.	Laporan Kinerja/pelaksanaan tugas.	12 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	0	-

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II	PIHAK I
SUHARI, S.H.	**ENING BUDIASTUTI, S.H.**

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR HARIYADI, S.Kom.

Jabatan : Analis Data dan Informasi

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : YUSTINA NUGRAHAENI, S.S.

Jabatan : JF Analis Hukum Ahli Muda

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II	PIHAK I
YUSTINA NUGRAHAENI, S.S.	NUR HARIYADI, S.Kom.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersusun bahan dan konsep untuk pelaksanaan kegiatan analisis di bidang Data dan Informasi.	Dokumen bahan dan konsep untuk pelaksanaan kegiatan analisis di bidang data dan informasi.	12 Dokumen
2	Melaksanakan pengumpulan data dengan mengkaji data primer dan sekunder melalui kuesioner, wawancara, verifikasi dan klarifikasi di lapangan untuk memperoleh informasi yang akurat terkait dengan Data dan Informasi.	Dokumen data primer dan sekunder.	12 Dokumen
3	Melaksanakan pengolahan data dengan menyusun berbagai bentuk cakupan informasi dengan menggunakan hasil-hasil yang diperoleh dari pengumpulan data.	Dokumen dan data hasil pengolahan data.	12 Dokumen
4	Menyiapkan bahan tindak lanjut berupa rekomendasi hasil analisis dengan menginventarisasi permasalahan yang terkait bidang tugas sebagai bahan kebijakan pimpinan.	Dokumen rekomendasi hasil analisis dan data permasalahan yang terkait bidang tugas data dan informasi.	12 Dokumen
5	Menyimpan dokumen berupa file soft copy dan fisik hasil pengolahan data.	Laporan penyimpanan file soft copy dan fisik hasil pengolahan data.	12 Dokumen
6	Melaksanakan penyiapan dan penyusunan dokumen, bahan, dan materi kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi unit kerjanya.	Dokumen, bahan, dan materi kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi unit kerja.	48 Dokumen
7	Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.	Laporan Kinerja/pelaksanaan tugas.	12 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	0	-

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II	PIHAK I
YUSTINA NUGRAHAENI, S.S.	NUR HARIYADI, S.Kom.

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RISNA NURDIANA, S.E.

Jabatan : Analis Dokumen Perizinan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : ARIYANTO, S.E.

Jabatan : JF Analis Hukum Ahli Muda

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II	PIHAK I
ARIYANTO, S.E.	RISNA NURDIANA, S.E.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersusun bahan dan konsep untuk pelaksanaan kegiatan analisis di bidang Dokumen Perizinan.	Dokumen bahan dan konsep untuk pelaksanaan kegiatan analisis di bidang dokumen perizinan.	48 Dokumen
2	Terlaksananya pengolahan data dengan menyusun berbagai bentuk cakupan informasi dengan menggunakan hasil-hasil yang diperoleh dari pengumpulan data.	Dokumen dan data hasil pengolahan data.	48 Dokumen
3	Tersusun bahan tindak lanjut berupa rekomendasi hasil analisis dengan menginventarisasi permasalahan yang terkait bidang tugas sebagai bahan kebijakan pimpinan.	Dokumen rekomendasi hasil analisis dan data permasalahan yang terkait bidang tugas dokumen perizinan.	48 Dokumen
4	Terlaksananya penyiapan dan penyusunan dokumen, bahan, dan materi kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi unit kerjanya.	Dokumen, bahan, dan materi kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi unit kerja.	192 Dokumen
5	Tersusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.	Laporan Kinerja/pelaksanaan tugas.	48 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II	PIHAK I
ARIYANTO, S.E.	RISNA NURDIANA, S.E.

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANA MARIA YULIA PRANANDARI, S.T.

Jabatan : Analis Dokumen Perizinan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : ARIYANTO, S.E.

Jabatan : JF Analis Hukum Ahli Muda

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II	PIHAK I
ARIYANTO, S.E.	ANA MARIA YULIA PRANANDARI, S.T.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mempersiapkan bahan dan konsep untuk pelaksanaan kegiatan analisis di bidang Dokumen Perizinan.	Dokumen bahan dan konsep untuk pelaksanaan kegiatan analisis di bidang dokumen perizinan.	48 Dokumen
2	Melaksanakan pengumpulan data dengan mengkaji data primer dan sekunder melalui kuesioner, wawancara, verifikasi dan klarifikasi di lapangan untuk memperoleh informasi yang akurat terkait dengan Dokumen Perizinan.	Dokumen data primer dan sekunder.	48 Dokumen
3	Melaksanakan pengolahan data dengan menyusun berbagai bentuk cakupan informasi dengan menggunakan hasil-hasil yang diperoleh dari pengumpulan data.	Dokumen dan data hasil pengolahan data.	48 Dokumen
4	Menyiapkan bahan tindak lanjut berupa rekomendasi hasil analisis dengan menginventarisasi permasalahan yang terkait bidang tugas sebagai bahan kebijakan pimpinan.	Dokumen rekomendasi hasil analisis dan data permasalahan yang terkait bidang tugas dokumen perizinan.	48 Dokumen
5	Menyimpan dokumen berupa file soft copy dan fisik hasil pengolahan data.	Laporan penyimpanan file soft copy dan fisik hasil pengolahan data.	48 Dokumen
6	Melaksanakan penyiapan dan penyusunan dokumen, bahan, dan materi kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi unit kerjanya.	Dokumen, bahan, dan materi kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi unit kerja.	192 Dokumen
7	Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.	Laporan Kinerja/pelaksanaan tugas.	48 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	0	-

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II	PIHAK I
ARIYANTO, S.E.	ANA MARIA YULIA PRANANDARI, S.T.

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARMINI, S.H.

Jabatan : Analis Dokumen Perizinan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : ARIYANTO, S.E.

Jabatan : JF Analis Hukum Ahli Muda

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II	PIHAK I
ARIYANTO, S.E.	DARMINI, S.H.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mempersiapkan bahan dan konsep untuk pelaksanaan kegiatan analisis di bidang Dokumen Perizinan.	Dokumen bahan dan konsep untuk pelaksanaan kegiatan analisis di bidang dokumen perizinan.	48 Dokumen
2	Melaksanakan pengumpulan data dengan mengkaji data primer dan sekunder melalui kuesioner, wawancara, verifikasi dan klarifikasi di lapangan untuk memperoleh informasi yang akurat terkait dengan Dokumen Perizinan.	Dokumen data primer dan sekunder.	48 Dokumen
3	Melaksanakan pengolahan data dengan menyusun berbagai bentuk cakupan informasi dengan menggunakan hasil-hasil yang diperoleh dari pengumpulan data.	Dokumen dan data hasil pengolahan data.	48 Dokumen
4	Menyiapkan bahan tindak lanjut berupa rekomendasi hasil analisis dengan menginventarisasi permasalahan yang terkait bidang tugas sebagai bahan kebijakan pimpinan.	Dokumen rekomendasi hasil analisis dan data permasalahan yang terkait bidang tugas dokumen perizinan.	48 Dokumen
5	Menyimpan dokumen berupa file soft copy dan fisik hasil pengolahan data.	Laporan penyimpanan file soft copy dan fisik hasil pengolahan data.	48 Dokumen
6	Melaksanakan penyiapan dan penyusunan dokumen, bahan, dan materi kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi unit kerjanya.	Dokumen, bahan, dan materi kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi unit kerja.	192 Dokumen
7	Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.	Laporan Kinerja/pelaksanaan tugas.	48 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	0	-

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II	PIHAK I
ARIYANTO, S.E.	DARMINI, S.H.

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RINA SAVISTA DWI ASTUTY, S.M.

Jabatan : Pengawas Penanaman Modal

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : ATIKAH YULIANA, S.S.

Jabatan : JF Analis Kebijakan Muda

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II	PIHAK I
ATIKAH YULIANA, S.S.	**RINA SAVISTA DWI ASTUTY, S.M.**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Menerima, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan mempelajari data yang terkait dengan pengelolaan penanaman modal.	Dokumen data yang terkait dengan pengelolaan penanaman modal.	12 Dokumen
2	Menyusun jadwal rencana pengawasan penanaman modal.	Dokumen jadwal rencana pengawasan.	2 Dokumen
3	Melaksanakan kegiatan pengawasan penanaman modal sesuai standar operasional yang telah ditetapkan.	Laporan kegiatan pengawasan.	235 Dokumen
4	Mengidentifikasi permasalahan dan hasil kegiatan pengawasan penanaman modal.	Dokumen permasalahan dan hasil kegiatan pengawasan penanaman modal.	48 Dokumen
5	Menyusun bahan evaluasi pengawasan penanaman modal.	Dokumen bahan evaluasi pengawasan Penanaman Modal.	12 Dokumen
6	Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.	Laporan Kinerja/pelaksanaan tugas.	12 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	0	-

Sragen, 03 Januari 2023

PIHAK II	PIHAK I
ATIKAH YULIANA, S.S.	RINA SAVISTA DWI ASTUTY, S.M.

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : dr. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Jabatan : Bupati Sragen

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BUPATI SRAGEN

PIHAK II

dr. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Sragen, 01 September 2023
PIHAK I

DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	TUJUAN/ SASARAN KINERJA/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Nilai realisasi penanaman modal	1.55 Trilyun Rupiah
	[-] Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/PMDN	1313 investor
	[#] Terlaksananya program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun	40 Persen
	[#] Terlaksananya Program Promosi Penananam Modal	Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/ besar	20 Persen
	[#] Terlaksananya Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM Bidang Perizinan dan Nonperizinan	83 Persen
	[#] Terlaksananya Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	10 Persen
	[#] Terlaksananya Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik	30 Persen
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat kinerja SAKIP Perangkat Daerah	BB (70,30) Predikat
	[-] Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	predikat kinerja SAKIP Perangkat Daerah	BB (70,30) predikat
	[#] Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 persen

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.880.965.608	DAU
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	211.237.000	DAU

3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	134.104.100	DAU
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	482.718.500	DAU
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	386.000.000	DAK NONFISIK
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	104.492.000	DAU

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II

dr. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

PIHAK I

DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	YULIUS DAVID SUPRIYADI, S.Sos.,M.M.
Jabatan	:	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama	:	DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.
Jabatan	:	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.	**YULIUS DAVID SUPRIYADI, S.Sos.,M.M.**

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	3 Dokumen
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan
3	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	2 Laporan
4	Terlaksananya administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan
5	Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlan laporan pengadaan barang milik daerah	2 Laporan
6	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan
7	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 Laporan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.783.000	DAU
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.094.473.000	DAU
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76.900.000	DAU
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	982.290.620	DAU
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	349.571.000	DAU
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.024.807.298	DAU

7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	349.140.690	DAU

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.	**YULIUS DAVID SUPRIYADI, S.Sos.,M.M.**

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERWAN ADHITYA SUDDIN, S.H.,M.M.

Jabatan : JF Analis Kebijakan Madya

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.	**ERWAN ADHITYA SUDDIN, S.H.,M.M.**

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/Kota	Jumlah penyusunan peta potensi investasi	2 Dokumen
2	Terlaksananya penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah even promosi	2 Kali
3	Terlaksananya pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100 Persen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	211.237.000	DAU
2	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	134.104.100	DAU
3	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	386.000.000	DAK NONFISIK

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.	**ERWAN ADHITYA SUDDIN, S.H.,M.M.**

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.

Jabatan : JF Analis Hukum Ahli Madya

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.	**ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.**

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANA MARIA YULIA PRANANDARI, S.T.

Jabatan : Analis Dokumen Perizinan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : ARIYANTO, S.E.

Jabatan : JF Analis Hukum Ahli Muda

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
ARIYANTO, S.E.	**ANA MARIA YULIA PRANANDARI, S.T.**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
ARIYANTO, S.E.	ANA MARIA YULIA PRANANDARI, S.T.

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mempersiapkan bahan dan konsep untuk pelaksanaan kegiatan analisis bidang Dokumen Perizinan	Dokumen bahan dan konsep untuk pelaksanaan kegiatan analisis di bidang dokumen perizinan	48 Dokumen
2	Melaksanakan pengumpulan data dengan mengkaji data primer dan sekunder melalui kuesioner, wawancara, verifikasi dan klarifikasi di lapangan untuk memperoleh informasi yang akurat terkait dengan Dokumen Perizinan	Dokumen data primer dan sekunder	48 Dokumen
3	Melaksanakan pengolahan data dengan menyusun berbagai bentuk cakupan informasi dengan menggunakan hasil-hasil yang diperoleh dari pengumpulan data	Dokumen dan data hasil pengolahan data	48 Dokumen
4	Menyiapkan bahan tindak lanjut berupa rekomendasi hasil analisis dengan menginventarisasi permasalahan yang terkait bidang tugas sebagai bahan kebijakan pimpinan	Dokumen rekomendasi hasil analisis dan data permasalahan yang terkait bidang tugas dokumen perizinan	48 Dokumen
5	Menyimpan dokumen berupa file soft copy dan fisik hasil pengolahan data	Laporan penyimpanan file soft copy dan fisik hasil pengolahan data	48 Dokumen
6	Melaksanakan penyiapan dan penyusunan dokumen, bahan, dan materi kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi unit kerjanya	Dokumen, bahan, dan materi kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi unit kerja	192 Dokumen
7	Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas	Laporan Kinerja/pelaksanaan tugas	48 Dokumen

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	ARIF BAHTIAR RIFAI, S.E.
Jabatan	:	JF Perencana Ahli Muda

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama	:	YULIUS DAVID SUPRIYADI, S.Sos.,M.M.
Jabatan	:	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
YULIUS DAVID SUPRIYADI, S.Sos.,M.M.	**ARIF BAHTIAR RIFAI, S.E.**

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan
2	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.783.000	DAU

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II

YULIUS DAVID SUPRIYADI, S.Sos.,M.M.

PIHAK I

ARIF BAHTIAR RIFAI, S.E.

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIYANTO, S.E.

Jabatan : JF Analis Hukum Ahli Muda

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.

Jabatan : JF Analis Hukum Ahli Madya

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.	**ARIYANTO, S.E.**

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1200 Pelaku usaha
2	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	150 Kegiatan usaha

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	131.252.000	DAU
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	97.077.000	DAU

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II

ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.

PIHAK I

ARIYANTO, S.E.

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ATIKAH YULIANA, S.S.

Jabatan : JF Analis Kebijakan Muda

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : ERWAN ADHITYA SUDDIN, S.H.,M.M.

Jabatan : JF Analis Kebijakan Madya

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
ERWAN ADHITYA SUDDIN, S.H.,M.M.	**ATIKAH YULIANA, S.S.**

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	141.240.500	DAU

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II

ERWAN ADHITYA SUDDIN, S.H.,M.M.

PIHAK I

ATIKAH YULIANA, S.S.

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARMINI, S.H.

Jabatan : Analis Dokumen Perizinan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : ARIYANTO, S.E.

Jabatan : JF Analis Hukum Ahli Muda

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
ARIYANTO, S.E.	**DARMINI, S.H.**

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mempersiapkan bahan dan konsep untuk pelaksanaan kegiatan analisis di bidang Dokumen Perizinan	Dokumen bahan dan konsep untuk pelaksanaan kegiatan	48 Dokumen
2	Melaksanakan pengumpulan data dengan mengkaji data primer dan sekunder melalui kuesioner, wawancara, verifikasi dan klarifikasi di lapangan untuk memperoleh informasi yang akurat terkait dengan Dokumen Perizinan	Dokumen data primer dan sekunder	48 Dokumen
3	Melaksanakan pengolahan data dengan menyusun berbagai bentuk cakupan informasi dengan menggunakan hasil-hasil yang diperoleh dari pengumpulan data	Dokumen dan data hasil pengolahan data	48 Dokumen
4	Menyiapkan bahan tindak lanjut berupa rekomendasi hasil analisis dengan menginventarisasi permasalahan yang terkait bidang tugas sebagai bahan kebijakan pimpinan	Dokumen rekomendasi hasil analisis dan data permasalahan yang terkait bidang tugas dokumen perizinan	48 Dokumen
5	Menyimpan dokumen berupa file soft copy dan fisik hasil pengolahan data	Laporan penyimpanan file soft copy dan fisik hasil pengolahan data	48 Dokumen
6	Melaksanakan penyiapan dan penyusunan dokumen, bahan, dan materi kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi unit kerja.	Dokumen, bahan, dan materi kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi unit kerjanya	192 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
ARIYANTO, S.E.	DARMINI, S.H.

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. EKOWATI YULI WIDYANINGSIH, M.Si.

Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : YULIUS DAVID SUPRIYADI, S.Sos.,M.M.

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
YULIUS DAVID SUPRIYADI, S.Sos.,M.M.	**Dra. EKOWATI YULI WIDYANINGSIH, M.Si.**

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	34 Paket
2	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	40 Orang
3	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket
4	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 Paket
5	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket
6	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	4 Paket
7	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan	1 Dokumen
8	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	35 Laporan
9	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen
10	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan	1 Unit
11	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	6 Paket
12	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	15 Unit
13	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan

14	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan
15	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Laporan
16	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4 Laporan
17	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 Unit
18	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 Unit
19	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	56 Unit
20	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	3 Unit
21	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit
22	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	31 Unit

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.685.000	DAU
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	46.215.000	DAU
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	42.108.000	DAU
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	631.275.620	DAU
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.350.000	DAU

6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	105.865.000	DAU
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	7.992.000	DAU
8	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.100.000	DAU
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.600.000	DAU
10	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.815.000	DAU
11	Pengadaan Mebel	229.215.000	DAU
12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	86.541.000	DAU
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000	DAU
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	433.436.000	DAU
15	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.798.298	DAU
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	491.073.000	DAU
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.750.000	DAU
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.789.409	DAU
19	Pemeliharaan Mebel	18.521.000	DAU
20	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.850.000	DAU
21	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	88.286.880	DAU
22	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.943.401	DAU

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
YULIUS DAVID SUPRIYADI, S.Sos.,M.M.	Dra. EKOWATI YULI WIDYANINGSIH, M.Si.

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENING BUDIASTUTI, S.H.

Jabatan : Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : SUHARI, S.H.

Jabatan : JF Analis Hukum Ahli Muda

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
SUHARI, S.H.	**ENING BUDIASTUTI, S.H.**

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mempersiapkan bahan dan konsep untuk pelaksanaan kegiatan analisis di bidang Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat.	Dokumen bahan dan konsep untuk pelaksanaan kegiatan analisis di bidang Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat	12 Dokumen
2	Melaksanakan pengumpulan data dengan mengkaji data primer dan sekunder melalui kuesioner, wawancara, verifikasi dan klarifikasi di lapangan untuk memperoleh informasi yang akurat terkait dengan Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat	Dokumen data primer dan sekunder	12 Dokumen
3	Melaksanakan pengolahan data dengan menyusun berbagai bentuk cakupan informasi dengan menggunakan hasil-hasil yang diperoleh dari pengumpulan data	Dokumen dan data hasil pengolahan data	12 Dokumen
4	Menyiapkan bahan tindak lanjut berupa rekomendasi hasil analisis dengan menginventarisasi permasalahan yang terkait bidang tugas sebagai bahan kebijakan pimpinan	Dokumen rekomendasi hasil analisis dan data permasalahan yang terkait bidang tugas hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat	12 Dokumen
5	Menyimpan dokumen berupa file soft copy dan fisik hasil pengolahan data	Laporan penyimpanan file soft copy dan fisik hasil pengolahan data	12 Dokumen
6	Melaksanakan penyiapan dan penyusunan dokumen, bahan, dan materi kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi unit kerja. tugas dan fungsi unit kerjanya	Laporan penyimpanan file soft copy dan fisik hasil pengolahan data	12 Dokumen

7	Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas	Laporan Kinerja/pelaksanaan tugas	12 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
SUHARI, S.H.	**ENING BUDIASTUTI, S.H.**

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAYA WIDIARTI, S.Kom.,M.Si.

Jabatan : JF Analis Kebijakan Muda

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : ERWAN ADHITYA SUDDIN, S.H.,M.M.

Jabatan : JF Analis Kebijakan Madya

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
ERWAN ADHITYA SUDDIN, S.H.,M.M.	**MAYA WIDIARTI, S.Kom.,M.Si.**

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	60 Kegiatan usaha
2	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	315 Pelaku Usaha
3	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan	100 Kegiatan Usaha

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	54.000.000	DAK NONFISIK
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	238.000.000	DAK NONFISIK
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	94.000.000	DAK NONFISIK

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
ERWAN ADHITYA SUDDIN, S.H.,M.M.	**MAYA WIDIARTI, S.Kom.,M.Si.**

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NASRUN NUGROHO, A.Md.

Jabatan : JF Pranata Komputer Terampil

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : ARIF BAHTIAR RIFAI, S.E.

Jabatan : JF Perencana Ahli Muda

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
ARIF BAHTIAR RIFAI, S.E.	**NASRUN NUGROHO, A.Md.**

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	-	Jumlah dokumen perencanaan yang disiapkan untuk penyusunan renja perubahan tahun 2023	1 Dokumen
2	-	Jumlah dokumen bahan penyusunan rencana kerja anggaran perubahan tahun 2023	2 Dokumen
3	-	Jumlah dokumen bahan penyusunan rencana kerja anggaran tahun 2024	1 Dokumen
4	-	Jumlah dokumen bahan penyusunan rencana aksi perubahan tahun 2023	1 Dokumen
5	-	Jumlah dokumen bahan penyusunan rencana tindak pengendalian tahun 2024	1 Dokumen
6	-	Jumlah aplikasi perencanaan dan kepegawaian yang dikelola	4 Aplikasi

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
ARIF BAHTIAR RIFAI, S.E.	**NASRUN NUGROHO, A.Md.**

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NING SETYOWATI, S.E.

Jabatan : JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : YULIUS DAVID SUPRIYADI, S.Sos.,M.M.

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
YULIUS DAVID SUPRIYADI, S.Sos.,M.M.	**NING SETYOWATI, S.E.**

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 orang/bulan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.094.473.000	DAU

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
YULIUS DAVID SUPRIYADI, S.Sos.,M.M.	**NING SETYOWATI, S.E.**

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR HARIYADI, S.Kom.

Jabatan : Analis Data dan Informasi

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : YUSTINA NUGRAHAENI, S.S.

Jabatan : JF Analis Hukum Ahli Muda

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
YUSTINA NUGRAHAENI, S.S.	**NUR HARIYADI, S.Kom.**

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersusun bahan dan konsep untuk pelaksanaan kegiatan analisis di bidang Data dan Informasi	Dokumen bahan dan konsep untuk pelaksanaan kegiatan analisis di bidang data dan informasi	12 Dokumen
2	Melaksanakan pengumpulan data dengan mengkaji data primer dan sekunder melalui kuesioner, wawancara, verifikasi dan klarifikasi di lapangan untuk memperoleh informasi yang akurat terkait dengan Data dan Informasi	Dokumen data primer dan sekunder	12 Dokumen
3	Melaksanakan pengolahan data dengan menyusun berbagai bentuk cakupan informasi dengan menggunakan hasil-hasil yang diperoleh dari pengumpulan data	Dokumen dan data hasil pengolahan data	12 Dokumen
4	Menyiapkan bahan tindak lanjut berupa rekomendasi hasil analisis dengan menginventarisasi permasalahan yang terkait bidang tugas sebagai bahan kebijakan pimpinan	Dokumen rekomendasi hasil analisis dan data permasalahan yang terkait bidang tugas data dan informasi	12 Dokumen
5	Menyimpan dokumen berupa file soft copy dan fisik hasil pengolahan data	Laporan penyimpanan file soft copy dan fisik hasil pengolahan data	12 Dokumen
6	Melaksanakan penyiapan dan penyusunan dokumen, bahan, dan materi kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi unit kerjanya	Dokumen, bahan, dan materi kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi unit kerja	48 Dokumen
7	Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas	Laporan Kinerja/pelaksanaan tugas	12 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
YUSTINA NUGRAHAENI, S.S.	**NUR HARIYADI, S.Kom.**

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OKTAVIA NILA PERMATA, S.Sos.

Jabatan : Analis Penanaman Modal

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : SRI UMIYARSI, S.E.

Jabatan : JF Analis Kebijakan Muda

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
SRI UMIYARSI, S.E.	**OKTAVIA NILA PERMATA, S.Sos.**

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mempersiapkan bahan dan konsep untuk pelaksanaan kegiatan analisis di bidang Penanaman Modal	Dokumen bahan dan konsep untuk pelaksanaan kegiatan analisis di bidang Penanaman Modal	12 Dokumen
2	Melaksanakan pengolahan data dengan menyusun berbagai bentuk cakupan informasi dengan menggunakan hasil-hasil yang diperoleh dari pengumpulan data	Dokumen dan data hasil pengolahan data	12 Dokumen
3	Melaksanakan penyiapan dan penyusunan dokumen, bahan, dan materi kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi unit kerja.	Dokumen, bahan, dan materi kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi unit kerjanya.	48 Dokumen
4	Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.	Laporan Kinerja/pelaksanaan tugas.	12 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
SRI UMIYARSI, S.E.	**OKTAVIA NILA PERMATA, S.Sos.**

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RATIH POESPITOWATI, S.E.

Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : NING SETYOWATI, S.E.

Jabatan : JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
NING SETYOWATI, S.E.	**RATIH POESPITOWATI, S.E.**

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mengumpulkan bahan, materi, dan data yang digunakan untuk kegiatan penyusunan laporan keuangan	Dokumen bahan, materi, dan data penyusunan laporan keuangan	12 Dokumen
2	Meneliti, mengklasifikasikan, dan mengolah bahan, materi, dan data penyusunan laporan keuangan	Dokumen bahan, materi, dan data hasil penelitian, klasifikasi dan pengolahan.	12 Dokumen
3	Melakukan penyusunan data dan dokumen laporan keuangan sesuai petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku	Dokumen laporan dan hasil penyusunan Laporan Keuangan	12 Dokumen
4	Meneliti, mendiskusikan, dan memperbaiki hasil penyusunan data dan dokumen laporan keuangan	Dokumen perbaikan hasil penyusunan data dan dokumen laporan keuangan	12 Dokumen
5	Menyusun data dan dokumen laporan keuangan serta memintakan pengesahan dari pejabat yang berwenang	Data dan dokumen hasil penyusunan Laporan Keuangan yang telah disahkan	12 Dokumen
6	Menyiapkan dan menyusun data dan dokumen kegiatan - kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi - sesuai tugas jabatan	Data dan dokumen kegiatan - kegiatan	48 Dokumen
7	Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas	Laporan Kinerja/pelaksanaan tugas	12 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
NING SETYOWATI, S.E.	**RATIH POESPITOWATI, S.E.**

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RINA SAVISTA DWI ASTUTY, S.M.

Jabatan : Pengawas Penanaman Modal

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : MAYA WIDIARTI, S.Kom.,M.Si.

Jabatan : JF Analis Kebijakan Muda

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
MAYA WIDIARTI, S.Kom.,M.Si.	**RINA SAVISTA DWI ASTUTY, S.M.**

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Menerima, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan mempelajari data yang terkait dengan pengelolaan penanaman modal.	Dokumen data yang terkait dengan pengelolaan penanaman modal	12 DOKUMEN
2	Menyusun jadwal rencana	Dokumen jadwal rencana pengawasan	2 DOKUMEN
3	Melaksanakan kegiatan pengawasan penanaman modal sesuai standar operasional yang telah ditetapkan	Laporan kegiatan pengawasan	235 DOKUMEN
4	Mengidentifikasi permasalahan dan hasil kegiatan pengawasan penanaman modal	Dokumen permasalahan dan hasil kegiatan pengawasan penanaman modal	48 DOKUMEN
5	Menyusun bahan evaluasi pengawasan penanaman modal	Dokumen bahan evaluasi pengawasan Penanaman Modal.	12 DOKUMEN
6	Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.	Laporan Kinerja/pelaksanaan tugas	12 DOKUMEN

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
MAYA WIDIARTI, S.Kom.,M.Si.	**RINA SAVISTA DWI ASTUTY, S.M.**

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RISNA NURDIANA, S.E.

Jabatan : Analis Dokumen Perizinan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : ARIYANTO, S.E.

Jabatan : JF Analis Hukum Ahli Muda

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
ARIYANTO, S.E.	**RISNA NURDIANA, S.E.**

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersusun bahan dan konsep untuk pelaksanaan kegiatan analisis di bidang Dokumen Perizinan	Dokumen bahan dan konsep untuk pelaksanaan kegiatan analisis di bidang dokumen perizinan	48 Dokumen
2	Terlaksananya pengolahan data dengan menyusun berbagai bentuk cakupan informasi dengan menggunakan hasil-hasil yang diperoleh dari pengumpulan data	Dokumen dan data hasil pengolahan data	48 Dokumen
3	Tersusun bahan tindak lanjut berupa rekomendasi hasil analisis dengan menginventarisasi permasalahan yang terkait bidang tugas sebagai bahan kebijakan pimpinan	Dokumen rekomendasi hasil analisis dan data permasalahan yang terkait bidang tugas dokumen perizinan	48 Dokumen
4	Terlaksananya penyiapan dan penyusunan dokumen, bahan, dan materi kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi unit kerjanya	Dokumen, bahan, dan materi kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi unit kerja	192 Dokumen
5	Tersusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.	Laporan Kinerja/pelaksanaan tugas.	48 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
ARIYANTO, S.E.	RISNA NURDIANA, S.E.

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI UMIYARSI, S.E.

Jabatan : JF Analis Kebijakan Muda

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : ERWAN ADHITYA SUDDIN, S.H.,M.M.

Jabatan : JF Analis Kebijakan Madya

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
ERWAN ADHITYA SUDDIN, S.H.,M.M.	**SRI UMIYARSI, S.E.**

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
2	Terlaksananya Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	88.839.000	DAU
2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	122.398.000	DAU

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II

ERWAN ADHITYA SUDDIN, S.H.,M.M.

PIHAK I

SRI UMIYARSI, S.E.

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUGIANTO, S.E.

Jabatan : Analis Jabatan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : Dra. EKOWATI YULI WIDYANINGSIH, M.Si.

Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
Dra. EKOWATI YULI WIDYANINGSIH, M.Si.	**SUGIANTO, S.E.**

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mempersiapkan bahan dan konsep untuk pelaksanaan kegiatan analisis di bidang jabatan	Dokumen bahan dan konsep untuk pelaksanaan kegiatan	12 Dokumen
2	Melaksanakan pengumpulan data dengan mengkaji data primer dan sekunder melalui kuesioner, wawancara, verifikasi dan klarifikasi di lapangan untuk memperoleh informasi yang akurat terkait dengan jabatan	Dokumen data primer dan sekunder	12 Dokumen
3	Menyiapkan bahan tindak lanjut berupa rekomendasi hasil analisis dengan menginventarisasi permasalahan yang terkait bidang tugas sebagai bahan kebijakan pimpinan	Dokumen rekomendasi hasil analisis dan data permasalahan yang terkait bidang tugas jabatan	12 Dokumen
4	Melaksanakan penyiapan dan penyusunan dokumen, bahan, dan materi kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi unit kerja.	Dokumen, bahan, dan materi kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi unit kerjanya	48 Dokumen
5	Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas	Laporan Kinerja/pelaksanaan tugas	12 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
Dra. EKOWATI YULI WIDYANINGSIH, M.Si.	**SUGIANTO, S.E.**

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUHARI, S.H.

Jabatan : JF Analis Hukum Ahli Muda

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.

Jabatan : JF Analis Hukum Ahli Madya

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.	**SUHARI, S.H.**

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	500 Kegiatan usaha
2	Terlaksananya Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	93 Orang

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	216.033.000	DAU
2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	38.356.500	DAU

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II

ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.

PIHAK I

SUHARI, S.H.

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUHARPADMI, S.H.

Jabatan : Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : ARIF BAHTIAR RIFAI, S.E.

Jabatan : JF Perencana Ahli Muda

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
ARIF BAHTIAR RIFAI, S.E.	**SUHARPADMI, S.H.**

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mengumpulkan bahan, materi, dan data yang digunakan untuk kegiatan penyusunan program anggaran dan pelaporan	Dokumen bahan, materi, dan data penyusunan program anggaran dan pelaporan	12 Dokumen
2	Melakukan penyusunan data dan dokumen program anggaran dan pelaporan sesuai petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku	Dokumen laporan dan hasil penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	12 Dokumen
3	Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas	Laporan Kinerja/pelaksanaan tugas	12 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
ARIF BAHTIAR RIFAI, S.E.	**SUHARPADMI, S.H.**

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	YULIANANTO DONI P, S.Kom.
Jabatan	:	JF Pranata Komputer Ahli Muda

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama	:	YULIUS DAVID SUPRIYADI, S.Sos.,M.M.
Jabatan	:	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
YULIUS DAVID SUPRIYADI, S.Sos.,M.M.	**YULIANANTO DONI P, S.Kom.**

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersusun rencana studi kelayakan pengolahan data	Dokumen perencanaan kegiatan perencanaan, analisis, perancangan, impelementasi, pengembangan dan atau operasional sistem informasi berbasis komputer	1 Dokumen
2	Membuat rancangan sitem informasi	Dokumen perencanaan kegiatan perencanaan, analisis, perancangan, impelementasi, pengembangan dan atau operasional sistem informasi	1 Dokumen
3	Membuat spesifikasi teknis sistem komputer	Dokumen dan data bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan, analisis, perancangan, impelementasi, pengembangan dan atau operasional sistem informasi berbasis komputer	1 Dokumen
4	Mengembangkan sistem database	Dokumen rencana pengembangan kegiatan perencanaan, analisis, perancangan, impelementasi, pengembangan dan atau operasional sistem informasi berbasis komputer	1 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
YULIUS DAVID SUPRIYADI, S.Sos.,M.M.	YULIANANTO DONI P, S.Kom.

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUSTINA NUGRAHAENI, S.S.

Jabatan : JF Analis Hukum Ahli Muda

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.

Jabatan : JF Analis Hukum Ahli Madya

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II	PIHAK I
ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.	**YUSTINA NUGRAHAENI, S.S.**

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	108.392.000	DAU

Sragen, 01 September 2023

PIHAK II

ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.

PIHAK I

YUSTINA NUGRAHAENI, S.S.

Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Kabupaten Sragen
Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen
Periode Pelaksanaan : Tahun 2023

Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1	Nilai realisasi penanaman modal	Rp triyun	1,55	0,52
2	Jumlah PMA PMDN	investor	1,313	2202

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Kinerja dan Anggaran RKPD		Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Kinerja dan Realisasi Anggaran		Faktor
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		
										8		9		10		11								
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Rata-rata capaian kinerja OPD by Program (%)							28,17	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Rata-rata capaian kinerja OPD by Kegiatan (%)							34,75		0,00		0,00		0,00		0,00						
			Rata-rata capaian kinerja OPD by Sub Kegiatan (%)							29,47		0,00		0,00		0,00		0,00						
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			37.222.101.000		4.230.008.480		6.726.054.208		973.794.739		0		0		0		14,48		5.203.803.219		14	
2.18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			37.222.101.000		4.230.008.480		6.726.054.208		973.794.739		0		0		0		14,48		5.203.803.219		14	
2.18.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (%)	100	29.636.301.000	0	4.180.690.480	100	5.371.835.708	25	924.476.739	0	0	0	0	0	0	25,00	17,21	25		25	17		
2.18.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (dokumen)	2	6.000.000	1	3.783.000	4	3.783.000	1	0	0	0	0	0	0	0	25,00	0,00	2	3.783.000	100	63		
2.18.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	6.000.000	1	3.783.000	1	3.783.000	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00	0,00	2	3.783.000	200	63		
2.18.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasikeuangan perangkat daerah (bulan)	60	19.582.794.000	3	3.800.000.000	12	3.190.649.009	3	547.632.759	0	0	0	0	0	0	25,00	17,16	6	4.347.632.759	10	22		
2.18.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	125	19.582.794.000	25	3.800.000.000	25	3.190.649.009	24	547.632.759	0	0	0	0	0	0	96,00	17,16	49	4.347.632.759	39,2	22		
2.18.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah (laporan)	9	272.508.000	0	0	1	83.895.000	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00	0,00	1	0	11,1111	0		
2.18.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	110	114.520.000	0	0	42	37.680.000	31	0	0	0	0	0	0	0	75,81	0,00	31	0	28,1818	0		
2.18.01.2.06.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	110	157.988.000	0	0	40	46.215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		(TW1 - Penghambat) Rancana kegiatan diraksanakan pada TW III
2.18.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah (bulan)	60	3.503.699.000	0	81.341.092	12	550.920.000	3	81.278.082	0	0	0	0	0	0	25,00	14,75	3	162.619.184	5	5		
2.18.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20	218.736.000	1	8.810.000	4	42.108.000	1	8.810.000	0	0	0	0	0	0	25,00	20,92	2	17.620.000	10	8		
2.18.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	32	1.352.430.000	2	25.870.000	6	219.230.000	2	25.807.000	0	0	0	0	0	0	33,33	11,77	4	51.677.000	12,5	4		
2.18.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20	504.798.000	1	7.194.000	4	64.350.900	2	7.194.000	0	0	0	0	0	0	50,00	11,18	3	14.388.000	15	3		
2.18.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20	738.852.000	1	22.675.400	3	131.615.000	1	22.675.400	0	0	0	0	0	0	33,33	20,32	2	45.350.800	10	6		
2.18.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5	21.758.000	1	330.000	1	7.992.000	1	330.000	0	0	0	0	0	0	100,00	4,13	2	660.000	40	3		
2.18.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	120	490.000.000	5	8.261.692	25	75.000.000	11	8.261.682	0	0	0	0	0	0	44,00	11,02	16	16.523.384	13,3333	3		
2.18.01.2.06.10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5	78.125.000	1	8.200.000	1	15.600.000	1	8.200.000	0	0	0	0	0	0	100,00	52,56	2	16.400.000	40	21		
2.18.01.2.06.11		Dukungan Pelaksanaan Sistem	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	4	90.000.000	0	0	1	15.025.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		(TW1 - Penghambat)

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Kinerja dan Anggaran RKPD		Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Kinerja dan Realisasi Anggaran		Faktor
										I		II		III		IV								
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [Dokumen]																					sasaran kegiatan penyediaan bandhwith, namun alokasi yang disediakan Diskominfo untuk sementara masih cukup
2.18.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]	9	1.234.223.000	0	0	2	192.261.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
2.18.01.2.07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan [Unit]	1	293.815.000	1	0	1	33.815.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	0	100	0	[TW1 - Penghambat] sasaran kegiatan penyediaan bandhwith, namun alokasi yang disediakan Diskominfo untuk sementara masih cukup[TW1 - Penghambat] sasaran sub kegiatan adalah penyediaan kendaraan dinas roda dua, dan pada palikasi e-catalouge belum tersedia barang yang sesuai dengan speselfikasi
2.18.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	11	564.408.000	0	0	4	99.337.000	1	0	0	0	0	0	0	0	25,00	0,00	1	0	9.09091	0	
2.18.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]	57	376.000.000	0	0	5	59.109.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	[TW1 - Penghambat] Sasaran kegiatan merupakan pergeseran, sehingga pelaksanaan kegiatan menunggu pengesahan DPA
2.18.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]	60	3.842.382.000	0	278.653.724	12	1.071.423.298	3	278.653.224	0	0	0	0	0	0	25,00	26,01	3	557.306.948	5	15	
2.18.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	20	21.199.000	1	300.000	4	5.500.000	1	300.000	0	0	0	0	0	0	25,00	5,45	2	600.000	10	3	
2.18.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	20	1.733.444.000	1	97.427.224	4	471.272.000	1	97.427.224	0	0	0	0	0	0	25,00	20,67	2	194.854.448	10	11	
2.18.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	20	567.739.000	1	9.086.000	4	105.978.298	1	9.086.000	0	0	0	0	0	0	25,00	8,57	2	18.172.000	10	3	
2.18.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	20	1.520.000.000	1	171.840.500	4	488.673.000	1	171.840.000	0	0	0	0	0	0	25,00	35,16	2	343.680.500	10	23	
2.18.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]	9	1.194.695.000	0	16.912.664	2	278.404.401	1	16.912.664	0	0	0	0	0	0	50,00	6,07	1	33.825.328	11.1111	3	
2.18.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya [Unit]	43	389.000.000	1	5.725.000	3	54.150.000	2	5.725.000	0	0	0	0	0	0	66.67	10,57	3	11.450.000	6.97674	3	
2.18.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya [Unit]	12	440.000.000	2	11.187.664	12	111.217.000	3	11.187.664	0	0	0	0	0	0	25,00	10,06	5	22.375.328	41.6667	5	
2.18.01.2.09.05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	131	87.564.000	0	0	56	18.521.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	[TW1 - Penghambat] sebagian besar mebel masih cukup baik
2.18.01.2.09.07		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit]	0	47.131.000	0	0	3	20.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		0	[TW1 - Penghambat] sebagian besar mebel masih cukup baik[TW1 - Penahambat] sebagian aset masih cukup baik
2.18.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	104.000.000	0	0	1	34.915.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		0	[TW1 - Penghambat]

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Kinerja dan Anggaran RKPD		Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Kinerja dan Realisasi Anggaran		Faktor
										I		II		III		IV								
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]																					sebagian besar mebel masih cukup baik[TW1 - Penghambat] sebagian aset masih cukup baik[TW1 - Penghambat] Gedung masih dalam masa pemeliharaan penyedia
2.18.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]	128	127.000.000	0	0	31	38.751.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	[TW1 - Penghambat] sebagian besar mebel masih cukup baik[TW1 - Penghambat] sebagian aset masih cukup baik[TW1 - Penghambat] Gedung masih dalam masa pemeliharaan penyedia[TW1 - Penghambat] Sarana dan prasarana gedung sebagian masih dalam masa pemeliharaan penyedia
									Rata-rata capaian kinerja (%)	25,00	17,21	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	17,21					
									Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR					
2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]	50	1.000.000.000	0	4.197.000	40	211.237.000	0	4.197.000	0	0	0	0	0	0	0,00	1,99	0		0	1	
2.18.02.2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	jumlah penyusunan peta potensi investasi [dokumen]	5	1.000.000.000	0	4.197.000	2	211.237.000	0	4.197.000	0	0	0	0	0	0	0,00	1,99	0	8.394.000	0	1	
2.18.02.2.02.01		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota [Dokumen]	4	500.000.000	0	0	1	88.839.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	[TW1 - Penghambat] sebagian besar mebel masih cukup baik[TW1 - Penghambat] sebagian aset masih cukup baik[TW1 - Penghambat] Gedung masih dalam masa pemeliharaan penyedia[TW1 - Penghambat] Sarana dan prasarana gedung sebagian masih dalam masa pemeliharaan penyedia[TW1 - Penghambat] rencana kegiatan pada TW II
2.18.02.2.02.02		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota [Dokumen]	5	500.000.000	0	4.197.000	1	122.398.000	0	4.197.000	0	0	0	0	0	0	0,00	3,43	0	8.394.000	0	2	[TW1 - Penghambat] sebagian besar mebel masih cukup baik[TW1 - Penghambat] sebagian aset masih cukup baik[TW1 - Penghambat] Gedung masih dalam masa pemeliharaan penyedia[TW1 - Penghambat] Sarana dan prasarana gedung sebagian masih dalam masa pemeliharaan penyedia[TW1 - Penghambat] rencana kegiatan pada TW II[TW1 - Penghambat] rencana kegiatan pada TW III
									Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99					

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Kinerja dan Anggaran RKPD		Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Kinerja dan Realisasi Anggaran		Faktor
										I		II		III		IV								
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR					
2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]	25	1.104.000.000	0	0	20	141.240.500	3	0	0	0	0	0	0	0	15,00	0,00	3		12	0	
2.18.03.2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah even promosi [kali]	10	1.104.000.000	0	0	2	141.240.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	[TW1 - Penghambat] rencana kegiatan pada TW II
2.18.03.2.01.02		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	10	1.104.000.000	0	0	2	141.240.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	[TW1 - Penghambat] sebagian besar mebel masih cukup baik[TW1 - Penghambat] sebagian aset masih cukup baik[TW1 - Penghambat] Gedung masih dalam masa pemeliharaan penyedia[TW1 - Penghambat] Sarana dan prasarana gedung sebagian masih dalam masa pemeliharaan penyedia[TW1 - Penghambat] rencana kegiatan pada TW II[TW1 - Penahambat] rencana kegiatan pada TW III[TW1 - Penahambat] rencana kegiatan pada TW II
									Rata-rata capaian kinerja (%)	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00					
									Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR					
2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan [poin]	84	2.735.827.000	0	35.143.500	83	507.848.000	90,5	35.143.500	0	0	0	0	0	0	109,04	6,92	90,5		107,738	3	[TW1 - Penularang] Layanan terpadu satu pintu dalam bingkai Mal Pelayanan Publik (MPP)
2.18.04.2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]	100	2.735.827.000	0	35.143.500	100	507.848.000	100	35.143.500	0	0	0	0	0	0	100,00	6,92	100	70.287.000	100	3	
2.18.04.2.01.01		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Pelaku Usaha)	6225	911.334.000	300	13.388.000	1200	131.253.000	1244	13.388.000	0	0	0	0	0	0	103,67	10,20	1544	26.776.000	24,8032	3	
2.18.04.2.01.02		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal (Kegiatan Usaha)	2500	1.083.563.000	100	20.082.000	500	216.033.000	248	20.082.000	0	0	0	0	0	0	49,60	9,30	348	40.164.000	13,92	4	
2.18.04.2.01.03		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (Orang)	400	240.000.000	15	1.673.500	93	63.487.000	42	1.673.500	0	0	0	0	0	0	45,16	2,64	57	3.347.000	14,25	1	
2.18.04.2.01.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	700	500.000.000	0	0	150	97.077.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	[TW1 - Penghambat] Rencana kegiatan dilaksanakan pada TW II
									Rata-rata capaian kinerja (%)	109,04	6,92	109,04	0,00	109,04	0,00	109,04	0,00	109,04	6,92					
									Predikat kinerja	STS	SR	STS	SR	STS	SR	STS	SR	STS	SR					
2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]	10	2.365.873.000	0	9.977.500	10	386.000.000	2	9.977.500	0	0	0	0	0	0	20,00	2,58	2		20	1	

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Kinerja dan Anggaran RKPD		Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Kinerja dan Realisasi Anggaran		Faktor
										I		II		III		IV								
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4																					
2.18.05.2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]	100	2.366.873.000	0	9.977.500	100	386.000.000	67	9.977.500	0	0	0	0	0	0	67,00	2,58	67	19.955.000	67	1	
2.18.06.2.01.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal [Kegiatan Usaha.]	300	459.000.000	0	0	60	54.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	[TW1 - Penghambat] Rencana kegiatan dilaksanakan pada TW II[TW1 - Penghambat] subkegiatan dilakukan pergeseran berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 906/2114/SJ
2.18.05.2.01.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal [Pelaku Usaha]	750	1.387.873.000	15	5.000.000	315	238.000.000	70	5.000.000	0	0	0	0	0	0	22,22	2,10	85	10.000.000	11,3333	1	
2.18.05.2.01.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan [Kegiatan Usaha]	500	519.000.000	10	4.977.500	100	94.000.000	27	4.977.500	0	0	0	0	0	0	27,00	5,30	37	9.955.000	7,4	2	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	20,00	2,58	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	2,58				
									Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR				
2.18.06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]	60	380.000.000	0	0	30	108.392.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	0	[TW1 - Penghambat] rencana kegiatan pada TW III
2.18.06.2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat	Persentase penyediaan data informasi perizinan/non perizinan [%]	60	380.000.000	0	0	30	108.392.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	[TW1 - Penghambat] rencana kegiatan pada TW III
2.18.06.2.01.01		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang	6	380.000.000	0	0	1	108.392.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	[TW1 - Penghambat] rencana kegiatan pada TW III
									Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR				

Sragen, April 2023

Kepala DPMPTSP Kabupaten Sragen

TUGIYONO, SH

NIP. 19670708 199303 1 010

Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Kabupaten Sragen
Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen
Periode Pelaksanaan : Tahun 2023

Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1	Nilai realisasi penanaman modal	Rp triliyun	1,55	1,18
2	Jumlah PMA PMDN	investor	1313	4967

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan		Faktor	Tinjut/ Rekomendasi
										I		II		III		IV									
										8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										Rata-rata capaian kinerja OPD by Program (%)	116,67	154,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
										Rata-rata capaian kinerja OPD by Kegiatan (%)	83,38	107,44			0,00		0,00		0,00						
										Rata-rata capaian kinerja OPD by Sub Kegiatan (%)	115,08	119,27			0,00		0,00		0,00						
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN			37.222.101.000		4.230.908.480		6.726.054.208		973.794.739		2.664.805.464		0		0		39,62		6.867.383.944		18		
2.18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN			37.222.101.000		4.230.908.480		6.726.054.208		973.794.739		2.664.805.464		0		0		39,62		6.867.383.944		18		
2.18.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah [%]	100	29.636.301.000	0	4.188.690.480	100	5.371.335.708	25	924.476.739	50	2.402.302.864	0	0	0	0	100,00	44,72	50		50	22		
2.18.01.2.01		Perancanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun [dokumen]	2	6.000.000	1	3.783.000	4	3.783.000	1	0	2	0	0	0	0	0	100,00	0,00	3	3.783.000	150	63		
2.18.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD [Laporan]	1	6.000.000	1	3.783.000	1	3.783.000	1	0	1	0	0	0	0	0	100,00	0,00	2	3.783.000	200	63		
2.18.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasikeuangan perangkat daerah [bulan]	60	19.582.794.000	3	3.800.000.000	12	3.190.649.009	3	547.632.759	6	1.498.543.631	0	0	0	0	100,00	46,97	9	5.298.543.631	15	27		
2.18.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]	125	19.582.794.000	25	3.800.000.000	25	3.190.649.009	24	547.632.759	24	1.498.543.631	0	0	0	0	96,00	0,00	49	5.298.543.631	39.2	27		
2.18.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [laporan]	9	272.508.000	0	0	1	83.895.000	1	0	1	27.430.000	0	0	0	0	100,00	32,70	1	0	11.1111	0		
2.18.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan [Paket]	110	114.520.000	0	0	42	37.680.000	31	0	31	27.430.000	0	0	0	0	0,00	0,00	31	0	28.1818	0		
2.18.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan [Orang]	110	157.988.000	0	0	40	46.215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	[TW1 - Penghambat] Rencana kegiatan dilaksanakan pada TW III [TW2 - Penghambat] Rencana kegiatan dilaksanakan pada TW III	[TW2] [TW3] Pelaksanaan pada TW III
2.18.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah [bulan]	60	3.503.699.000	0	81.341.092	12	550.920.000	3	81.278.092	6	195.671.836	0	0	0	0	100,00	35,52	6	277.012.928	10	8		
2.18.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	20	218.736.000	1	8.810.000	4	42.108.000	1	8.810.000	1	8.810.000	0	0	0	0	100,00	20,92	2	17.620.000	10	8		
2.18.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	32	1.352.430.000	2	25.870.000	6	219.230.000	2	25.807.000	4	74.966.000	0	0	0	0	200,00	0,00	6	100.836.000	18.75	7		
2.18.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	20	504.798.000	1	7.194.000	4	64.350.000	2	7.194.000	3	15.844.500	0	0	0	0	150,00	0,00	4	23.038.500	20	5		
2.18.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan [Paket]	20	738.852.000	1	22.675.400	3	111.615.000	1	22.675.400	3	40.705.400	0	0	0	0	300,00	0,00	4	63.380.800	20	9		
2.18.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan [Dokumen]	5	21.758.000	1	330.000	1	7.992.000	1	330.000	1	1.530.000	0	0	0	0	100,00	0,00	2	1.860.000	40	9		

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan		Faktor	Tinjut/ Rekomendasi
										I		II		III		IV									
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.18.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	120	490.000.000	5	8.261.692	25	75.000.000	11	8.261.692	23	38.265.936	0	0	0	0	191,67	0,00	28	46.527.628	23.3333	9		
2.18.01.2.06.10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	5	78.125.000	1	8.200.000	1	15.600.000	1	8.200.000	1	15.550.000	0	0	0	0	100,00	0,00	2	23.750.000	40	30		
2.18.01.2.06.11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [Dokumen]	4	99.000.000	0	0	1	15.025.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	[TW1 - Penghambat] sasaran kegiatan penyediaan bandhwith, namun alokasi yang disediakan Diskominfo untuk sementara masih cukup	[TW2] sasaran kegiatan penyediaan bandhwith, namun alokasi yang disediakan Diskominfo
2.18.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]	9	1.234.223.000	0	0	2	192.261.000	0	0	2	114.886.000	0	0	0	0	200,00	59,76	2	114.886.000	22.2222	9		
2.18.01.2.07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan [Unit]	1	293.815.000	1	0	1	33.815.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	0	100	0	[TW1 - Penghambat] sasaran sub kegiatan adalah penyediaan kendaraan dinas roda dua, dan pada palikasi e-catalouge belum tersedia barang yang sesuai dengan speseifikasi [TW2 - Penghambat] dalam proses pemesanan	[TW2] [TW3]
2.18.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (paket)	11	564.408.000	0	0	4	99.337.000	1	0	3	89.440.000	0	0	0	0	75,00	0,00	3	89.440.000	27.2727	16		
2.18.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]	57	376.000.000	0	0	5	59.109.000	0	0	3	25.446.000	0	0	0	0	60,00	0,00	3	25.446.000	5.26316	7	[TW1 - Penghambat] Sasaran kegiatan merupakan pergeseran, sehingga pelaksanaan kegiatan menunggu pengesahan DPA	[TW2] secarafisik telah terealisasi sebagian
2.18.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]	60	3.842.382.000	0	278.653.724	12	1.071.473.298	3	278.653.224	6	473.730.763	0	0	0	0	100,00	44,22	6	752.384.487	10	20		
2.18.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	20	21.199.000	1	300.000	4	5.500.000	1	300.000	2	800.000	0	0	0	0	100,00	0,00	3	1.100.000	15	5		
2.18.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	20	1.733.444.000	1	97.427.224	4	471.272.000	1	97.427.224	2	193.823.763	0	0	0	0	100,00	0,00	3	291.250.987	15	17		
2.18.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	20	567.739.000	1	9.086.000	4	105.978.298	1	9.086.000	2	25.477.000	0	0	0	0	100,00	0,00	3	34.563.000	15	6		
2.18.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	20	1.520.000.000	1	171.840.500	4	488.673.000	1	171.840.000	2	253.630.000	0	0	0	0	100,00	0,00	3	425.470.500	15	28		
2.18.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]	9	1.194.695.000	0	16.912.664	2	278.404.401	1	16.912.664	1	92.040.634	0	0	0	0	100,00	33,06	1	108.953.298	11.1111	9		
2.18.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya [Unit]	43	389.000.000	1	5.725.000	3	54.150.000	2	5.725.000	3	18.924.640	0	0	0	0	100,00	0,00	4	24.649.640	9.30233	6		

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan		Faktor	Tinjut/ Rekomendasi
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.18.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya [Unit]	12	440.000.000	2	11.187.664	12	111.217.000	3	11.187.664	8	37.440.994	0	0	0	0	66,67	0,00	10	48.628.658	83,3333	11		
2.18.01.2.09.05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	131	87.564.000	0	0	56	18.521.000	0	0	5	0	0	0	0	0	20,83	0,00	5	0	3,81679	0	[TW1 - Penghambat] sebagian besar mebel masih cukup baik	[TW2]
2.18.01.2.09.07		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit]	0	47.131.000	0	0	3	20.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		0	[TW1 - Penghambat] sebagian aset masih cukup baik	[TW2]
2.18.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]	0	104.000.000	0	0	1	34.915.000	0	0	1	16.555.000	0	0	0	0	100,00	0,00	1	16.555.000		16	[TW1 - Penghambat] Gedung masih dalam masa pemeliharaan penyedia	[TW2]
2.18.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]	128	127.000.000	0	0	31	38.751.401	0	0	19	19.120.000	0	0	0	0	118,75	0,00	19	19.120.000	14,8438	15	[TW1 - Penghambat] Sarana dan prasarana gedung sebagian masih dalam masa pemeliharaan penyedia	[TW2]
								Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	0,00	100,00	0,00	100,0	0,00	100,	0,00	100,00	44,72				
								Predikat kinerja		ST	SR	ST	SR	ST	SR	ST	SR	ST	SR				
2.18.02		**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]**	**50**	**1.000.000.000**	**0**	**4.197.000**	**40**	**211.237.000**	**0**	**4.197.000**	**0**	**23.315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11,04**	**0**		**0**	**3**		
2.18.02.2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	jumlah penyusunan peta potensi investasi [dokumen]	5	1.000.000.000	0	4.197.000	2	211.237.000	0	4.197.000	0	23.315.000	0	0	0	0	0,00	11,04	0	27.512.000	0	3		
2.18.02.2.02.01		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota [Dokumen]	4	500.000.000	0	0	1	88.839.000	0	0	0	8.335.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	8.335.500	0	2	[TW1 - Penghambat] rencana kegiatan pada TW II [TW2 - Penghambat] Rumusan target investasi dan roadmap belum dapat dipastikan	[TW2] [TW3] lanjut di TW 3
2.18.02.2.02.02		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota [Dokumen]	5	500.000.000	0	4.197.000	1	122.398.000	0	4.197.000	0	14.979.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	19.176.500	0	4	[TW1 - Penghambat] rencana kegiatan pada TW III	[TW2]
								Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04				
								Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR				
2.18.03		**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**	**25**	**1.104.000.000**	**0**	**0**	**20**	**141.240.500**	**3**	**0**	**12,5**	**12.175.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156,25**	**8,62**	**12,5**		**50**	**1**		
2.18.03.2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah even promosi [kali]	10	1.104.000.000	0	0	2	141.240.500	0	0	0	12.175.500	0	0	0	0	0,00	8,62	0	12.175.500	0	1	[TW1 - Penghambat] rencana kegiatan pada TW II [TW2 - Penghambat] Jadwal pameran mengalami perubahan	[TW2] [TW3] lanjut di tw 3
2.18.03.2.01.02		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota [Dokumen]	10	1.104.000.000	0	0	2	141.240.500	0	0	0	12.175.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	12.175.500	0	1	[TW1 - Penghambat] rencana kegiatan pada TW II	[TW2]
								Rata-rata capaian kinerja (%)		150,00	0,00	150,00	0,00	150,0	0,00	150,	0,00	156,25	8,62				
								Predikat kinerja		STS	SR	STS	SR	STS	SR	STS	SR	STS	SR				

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan		Faktor	Tinjut/ Rekomendasi
										I		II		III		IV									
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.18.04		**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan [poin]**	**84**	**2.735.927.000**	**0**	**35.143.500**	**83**	**507.849.000**	**90.5**	**35.143.500**	**91.25**	**138.181.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109,94**	**27,21**	**91.25**		**108.631**	**6**	**[TW1 - Pendorong]** Layanan terpadu satu pintu dalam bingkai Mal Pelayanan Publik (MPP)	**[TW2]**
2.18.04.2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]	100	2.735.927.000	0	35.143.500	100	507.849.000	100	35.143.500	100	138.181.600	0	0	0	0	100,00	27,21	100	173.325.100	100	6		
2.18.04.2.01.01		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik [Pelaku Usaha]	6225	912.334.000	300	13.388.000	1200	131.252.000	2409	13.388.000	5112	33.470.000	0	0	0	0	852,00	0,00	5412	46.858.000	86,9398	5		
2.18.04.2.01.02		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal [Kegiatan Usaha]	2500	1.083.593.000	100	20.082.000	500	216.033.000	248	20.082.000	449	56.005.000	0	0	0	0	179,60	0,00	549	76.087.000	21,96	7		
2.18.04.2.01.03		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan [Orang]	400	240.000.000	15	1.673.500	93	63.487.000	42	1.673.500	86	7.094.000	0	0	0	0	172,00	0,00	101	8.767.500	25,25	4		
2.18.04.2.01.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah [Kegiatan Usaha]	700	500.000.000	0	0	150	97.077.000	0	0	35	41.612.600	0	0	0	0	23,33	0,00	35	41.612.600	5	8	**[TW1 - Penghambat]** Rencana kegiatan dilaksanakan pada TW II	**[TW2]**
									Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109,94**	**27,21**						
									Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	STS	SR						
2.18.05		**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]**	**10**	**2.365.873.000**	**0**	**9.977.500**	**10**	**386.000.000**	**2**	**9.977.500**	**12.61**	**87.530.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**252,20**	**22,68**	**12.61**		**126.1**	**4**		
2.18.05.2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]	100	2.365.873.000	0	9.977.500	100	386.000.000	67	9.977.500	67	87.530.500	0	0	0	0	67,00	22,68	67	97.508.000	67	4		
2.18.05.2.01.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal [Kegiatan Usaha.]	300	459.000.000	0	0	60	54.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	**[TW1 - Penghambat]** subkegiatan dilakukan pergeseran berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 906/2114/SJ	**[TW2]** subkegiatan diusulkn untuk dilakukan pergeseran
2.18.05.2.01.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal [Pelaku Usaha]	750	1.387.873.000	15	5.000.000	315	238.000.000	70	5.000.000	125	62.855.500	0	0	0	0	51,65	0,00	140	67.855.500	18,6667	5		
2.18.05.2.01.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan [Kegiatan Usaha]	500	519.000.000	10	4.977.500	100	94.000.000	27	4.977.500	70	24.675.000	0	0	0	0	140,00	0,00	80	29.652.500	16	6		

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan		Faktor	Tinjut/ Rekomendasi
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	0,00	100,00	0,00	100,0	0,00	100,	0,00	252,20	22,68						
									Predikat kinerja	ST	SR	ST	SR	ST	SR	ST	SR	STS	SR						
2.18.06		**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**	**60**	**380.000.000**	**0**	**0**	**30**	**108.392.000**	**0**	**0**	**0**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1,20**	**0**		**0**	**0**	**[TW1 - Penghambat]** rencana kegiatan pada TW III **[TW2 - Penghambat]** Laporan penyusunan data diselesaikan pada akhir tahun	**[TW2]** **[TW3]** lanjut di TW 3 dan 4
2.18.06.2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]	60	380.000.000	0	0	30	108.392.000	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0,00	1,20	0	1.300.000	0	0	[TW1 - Penghambat] rencana kegiatan pada TW III [TW3 - Penghambat] Laporan Penyusunan data dilakasanakan pada akhir tahun	[TW2] [TW4] lanjut di TW 3 dan 4
2.18.06.2.01.01		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen]	6	380.000.000	0	0	1	108.392.000	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.300.000	0	0	[TW1 - Penghambat] rencana kegiatan pada TW III [TW2 - Penghambat] Laporan Penyusunan data dilakasanakan pada akhir tahun	[TW2] [TW3] lanjut di tw 3 dan tw 4
									Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20						
									Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						

Sragen, Juli 2023

Kepala DPMPTSP Kabupaten Sragen

DWI AGUSI PRASETYO, S.STP, M.SI

NIP 19701225 199810 1 001

Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Kabupaten Sragen
Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen
Periode Pelaksanaan : Tahun 2023 Triwulan III

Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Faktor
1	Nilai realisasi penanaman modal	Rp trilyun	1,55	1,78	Kemudahan perizinan berusaha
2	Jumlah PMA PMDN	investor	1313	10923	kemudahan perizinan berusaha

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja Pada III		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Rata-rata capaian kinerja OPD by Program (%)			**254,52**	**76,67**				
			Rata-rata capaian kinerja OPD by Kegiatan (%)			**104,19**					
			Rata-rata capaian kinerja OPD by Sub Kegiatan (%)			**127,61**					
2		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.726.054.208**		**4.404.885.649**		**65,49**		
2.18		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**6.726.054.208**		**4.404.885.649**		**65,49**		
2.18.01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah [%]**	**100,00**	**5.371.335.708**	**75,00**	**3.512.802.205**	**75,00**	**65,40**		
2.18.01.2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun [dokumen]	4,00	3.783.000	3,00	0	75,00	0,00		
2.18.01.2,01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD [Laporan]	1,00	3.783.000	1,00	0	100,00	0,00	**[TW3 - Penghambat]** Kegiatan fisik sudah direalisasi	**[TW4]** proses SPJ
2.18.01.2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administraskeuangan perangkat daerah [bulan]	12,00	3.190.649.009	9,00	2.209.359.266	75,00	69,24		
2.18.01.2,02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]	25,00	3.190.649.009	25,00	2.209.359.266	100,00	69,24		
2.18.01.2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [laporan]	1,00	83.895.000	1,00	27.430.000	100,00	32,70		
2.18.01.2,05.02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan [Paket]	42,00	37.680.000	31,00	27.430.000	73,81	72,80		
2.18.01.2,05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan [Orang]	40,00	46.215.000	0,00	0	0,00	0,00	**[TW3 - Penghambat]** rencana pelaksanaan di TW 4..	**[TW4]** pelaksanaan di TW 4..

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja Pada III		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.18.01.2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah [bulan]	12,00	550.920.000	9,00	311.425.972	75,00	56,53		
2.18.01.2,06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	4,00	42.108.000	3,00	17.796.000	75,00	42,26	**[TW3 - Penghambat]** penyediaan komponen instalasi listrik dinilai masih tercukupi	**[TW4]** -
2.18.01.2,06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	6,00	219.230.000	4,00	132.163.000	66,67	60,29		
2.18.01.2,06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	4,00	64.350.000	2,00	24.924.000	50,00	38,73	**[TW3 - Penghambat]** penyediaan makan minum rapat, namun tidak semua kegiatan rapat disediakan makan minum	**[TW4]** Penyelesaian SPJ
2.18.01.2,06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan [Paket]	3,00	111.615.000	2,00	58.705.400	66,67	52,60		
2.18.01.2,06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan [Dokumen]	1,00	7.992.000	1,00	2.460.000	100,00	30,78	**[TW3 - Penghambat]** Penyelesaian SPJ	**[TW4]** -
2.18.01.2,06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	25,00	75.000.000	36,00	59.827.572	144,00	79,77		
2.18.01.2,06.10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	1,00	15.600.000	1,00	15.550.000	100,00	99,68		
2.18.01.2,06.11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [Dokumen]	1,00	15.025.000	0,00	0	0,00	0,00	**[TW3 - Penghambat]** pergeseran anggaran	**[TW4]** pergeseran anggaran
2.18.01.2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]	2,00	192.261.000	2,00	130.636.000	100,00	67,95		
2.18.01.2,07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan [Unit]	1,00	33.815.000	0,00	0	0,00	0,00	**[TW3 - Penghambat]** Proses Surat Pesanan	**[TW4]** Pesanan
2.18.01.2,07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	4,00	99.337.000	4,00	97.740.000	100,00	98,39		
2.18.01.2,07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]	5,00	59.109.000	5,00	32.896.000	100,00	55,65		

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja Pada III		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.18.01.2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]	12,00	1.071.423.298	9,00	700.053.897	75,00	65,34		
2.18.01.2,08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	4,00	5.500.000	3,00	1.100.000	75,00	20,00	**[TW3 - Penghambat]** secara fisik telah terealisasi, proses SPJ	**[TW4]** -
2.18.01.2,08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	4,00	471.272.000	3,00	295.974.861	75,00	62,80		
2.18.01.2,08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	4,00	105.978.298	3,00	39.748.000	75,00	37,51	**[TW3 - Penghambat]** Beberapa peralatan baru selesai masa garansi, sehingga dinilai masih cukup baik	**[TW4]** Prioritas perbaikan peralatan dan perlengkapan
2.18.01.2,08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	4,00	488.673.000	3,00	363.231.036	75,00	74,33		
2.18.01.2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]	2,00	278.404.401	3,00	133.897.070	150,00	48,09		
2.18.01.2,09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya [Unit]	3,00	54.150.000	3,00	33.341.993	100,00	61,57		
2.18.01.2,09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya [Unit]	12,00	111.217.000	12,00	56.755.077	100,00	51,03		
2.18.01.2,09.05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	56,00	18.521.000	52,00	0	92,86	0,00		
2.18.01.2,09.07		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit]	3,00	20.850.000	2,00	0	66,67	0,00	**[TW3 - Penghambat]** secara fisik kondisi cukup baik	**[TW4]** pemeliharaan sesuai prioritas
2.18.01.2,09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]	1,00	34.915.000	1,00	16.555.000	100,00	47,42		
2.18.01.2,09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]	31,00	38.751.401	29,00	27.245.000	93,55	70,31		
Rata-rata capaian kinerja (%)						**100,00**	**78,10**	**75,00**	**65,40**		
Predikat kinerja						**ST**	**T**	**S**	**S**		

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja Pada III		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.18.02		**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]**	**40,00**	**211.237.000**	**22,22**	**123.793.900**	**55,55**	**58,60**		
2.18.02.2,02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	jumlah penyusunan peta potensi investasi [dokumen]	2,00	211.237.000	1,00	123.793.900	50,00	58,60		
2.18.02.2,02.01		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota [Dokumen]	1,00	88.839.000	0,00	8.335.500	0,00	9,38		
2.18.02.2,02.02		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota [Dokumen]	1,00	122.398.000	1,00	115.458.400	100,00	94,33		
			Rata-rata capaian kinerja (%)			**111,10**	**60,03**	**55,55**	**58,60**		
			Predikat kinerja			**STS**	**R**	**R**	**R**		
2.18.03		**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**	**20,00**	**141.240.500**	**36,40**	**131.298.744**	**182,00**	**92,96**		
2.18.03.2,01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah even promosi [kali]	2,00	141.240.500	2,00	131.298.744	100,00	92,96		
2.18.03.2,01.02		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota [Dokumen]	2,00	141.240.500	2,00	131.298.744	100,00	92,96		
			Rata-rata capaian kinerja (%)			**242,67**	**97,24**	**182,00**	**92,96**		
			Predikat kinerja			**STS**	**ST**	**STS**	**ST**		
2.18.04		**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan [poin]**	**83,00**	**507.849.000**	**87,50**	**320.260.800**	**105,42**	**63,06**		
2.18.04.2,01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]	100,00	507.849.000	100,00	320.260.800	100,00	63,06		
2.18.04.2,01.01		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik [Pelaku Usaha]	1.200,00	131.252.000	11.400,00	75.558.500	950,00	57,57		
2.18.04.2,01.02		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal [Kegiatan Usaha]	500,00	216.033.000	635,00	159.630.000	127,00	73,89		

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja Pada III		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.18.04.2,01.03		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan [Orang]	93,00	63.487.000	162,00	20.429.500	174,19	32,18	**[TW3 - Penghambat]** jumlah aduan yang tidak terlalu banyak	**[TW4]** pergeseran anggaran untuk lebih mengefektifkan kegiatan
2.18.04.2,01.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah [Kegiatan Usaha]	150,00	97.077.000	141,00	64.642.800	94,00	66,59		
			Rata-rata capaian kinerja (%)			**105,42**	**74,11**	**105,42**	**63,06**		
			Predikat kinerja			**STS**	**S**	**STS**	**R**		
2.18.05		**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]**	**10,00**	**386.000.000**	**58,42**	**217.880.000**	**584,20**	**56,45**	**[TW3 - Pendorong] Fasilitasi pelaporan bagi pelaku UKM**	**[TW4] peningkatan pembinaan dalam penyusunan LKPM**
2.18.05.2,01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]	100,00	386.000.000	67,00	217.880.000	67,00	56,45		
2.18.05.2,01.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal [Kegiatan Usaha.]	60,00	54.000.000	0,00	0	0,00	0,00	**[TW3 - Penghambat]** usuln pergeseran	**[TW4]** pergeseran anggaran
2.18.05.2,01.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal [Pelaku Usaha]	315,00	238.000.000	250,00	153.655.000	79,37	64,56		
2.18.05.2,01.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan [Kegiatan Usaha]	100,00	94.000.000	131,00	64.225.000	131,00	68,32		
			Rata-rata capaian kinerja (%)			**834,57**	**59,23**	**584,20**	**56,45**		
			Predikat kinerja			**STS**	**R**	**STS**	**R**		
2.18.06		**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**	**30,00**	**108.392.000**	**40,00**	**98.850.000**	**133,33**	**91,20**		
2.18.06.2,01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]	30,00	108.392.000	40,00	98.850.000	133,33	91,20	**[TW3 - Penghambat]** Laporan Penyusunan data dilakasanakan pada akhir tahun	**[TW4]** lanjut di TW 3 dan 4

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja Pada III		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.18.06.2,01.01		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen]	1,00	108.392.000	1,00	98.850.000	100,00	91,20		
Rata-rata capaian kinerja (%)						**133,33**	**92,87**				
Predikat kinerja						**STS**	**ST**				

Sragen, Oktober 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
NIP. 19791225 199810 1 001

Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Kabupaten Sragen
Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen
Periode Pelaksanaan : Tahun 2023 Triwulan IV

Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Faktor
1	Nilai realisasi penanaman modal	Rp trilyun	1,55	2,2	[Pendorong] Kemudahan perizinan berusaha
2	Jumlah PMA PMDN	investor	1313	14936	[Pendorong] kemudahan perizinan berusaha

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja Pada IV		Tingkat Capaian Kinerja dan		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Rata-rata capaian kinerja OPD by Program (%)			**193,51**	**96,83**				
			Rata-rata capaian kinerja OPD by Kegiatan (%)			**109,81**					
			Rata-rata capaian kinerja OPD by Sub Kegiatan (%)			**110,43**					
2		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**7.199.517.208**		**6.977.821.295**		**96,92**		
2.18		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**7.199.517.208**		**6.977.821.295**		**96,92**		
2.18.01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah [%]**	**100,00**	**5.880.965.608**	**100,00**	**5.671.801.188**	**100,00**	**96,44**		
2.18.01.2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun [dokumen]	4,00	3.783.000	4,00	3.280.000	100,00	86,70		
2.18.01.2,01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD [Laporan]	1,00	3.783.000	1,00	3.280.000	100,00	86,70	**[TW3 - Penghambat]** Kegiatan fisik sudah direalisasi **[TW4 - Pendorong]** Proses SPJ	**[TW4]** proses SPJ **[Rekom Berikutnya]** Selesai
2.18.01.2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administraskeuangan perangkat daerah [bulan]	12,00	3.094.473.000	12,00	3.006.566.236	100,00	97,16		
2.18.01.2,02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]	25,00	3.094.473.000	24,00	3.006.566.236	96,00	97,16		
2.18.01.2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [laporan]	1,00	76.900.000	2,00	68.231.000	200,00	88,73		
2.18.01.2,05.02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan [Paket]	34,00	30.685.000	31,00	27.430.000	91,18	89,39		

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja Pada IV		Tingkat Capaian Kinerja dan		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.18.01.2,05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan [Orang]	40,00	46.215.000	40,00	40.801.000	100,00	88,29	**[TW1 - Penghambat]** Rencana kegiatan dilaksanakan pada TW III **[TW2 - Penghambat]** Rencana kegiatan dilaksanakan pada TW III **[TW3 - Penghambat]** rencana pelaksanaan di TW 4..	**[TW2]** **[TW3]** Pelaksanaan pada TW III **[TW4]** pelaksanaan di TW 4 **[Rekom Berikutnya]** Selesai
2.18.01.2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah [bulan]	12,00	982.290.620	12,00	940.405.897	100,00	95,74		
2.18.01.2,06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	4,00	42.108.000	6,00	40.262.600	150,00	95,62	**[TW4 - Penghambat]** Penyelesaian SPJ	**[Rekom Berikutnya]** Penyelesaian SPJ
2.18.01.2,06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	8,00	631.275.620	11,00	606.172.000	137,50	96,02		
2.18.01.2,06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	4,00	64.350.000	4,00	55.524.000	100,00	86,28		
2.18.01.2,06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan [Paket]	4,00	105.865.000	2,00	104.137.300	50,00	98,37		
2.18.01.2,06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan [Dokumen]	1,00	7.992.000	1,00	3.660.000	100,00	45,80	**[TW4 - Penghambat]** Penyelesaian SPJ	**[Rekom Berikutnya]** -
2.18.01.2,06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	35,00	115.100.000	37,00	115.099.997	105,71	100,00		
2.18.01.2,06.10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	1,00	15.600.000	1,00	15.550.000	100,00	99,68		
2.18.01.2,06.11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [Dokumen]	1,00	0	0,00	0	0,00	0,00		
2.18.01.2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]	2,00	349.571.000	3,00	345.111.000	150,00	98,72		
2.18.01.2,07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan [Unit]	1,00	33.815.000	1,00	33.470.000	100,00	98,98	**[TW4 - Penghambat]** administrasi peng SPJ an	**[Rekom Berikutnya]** realisasi (pencairan)
2.18.01.2,07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	6,00	229.215.000	9,00	225.478.000	150,00	98,37		
2.18.01.2,07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]	15,00	86.541.000	15,00	86.163.000	100,00	99,56		
2.18.01.2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]	12,00	1.024.807.298	12,00	993.363.785	100,00	96,93		

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja Pada IV		Tingkat Capaian Kinerja dan		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.18.01.2,08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	4,00	5.500.000	4,00	5.100.000	100,00	92,73	**[TW4 - Penghambat]** penyelesaian SPJ	**[Rekom Berikutnya]** -
2.18.01.2,08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	4,00	433.436.000	4,00	421.642.749	100,00	97,28		
2.18.01.2,08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	4,00	94.798.298	4,00	87.494.000	100,00	92,29		
2.18.01.2,08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	4,00	491.073.000	4,00	479.127.036	100,00	97,57		
2.18.01.2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]	6,00	349.140.690	6,00	314.843.270	100,00	90,18		
2.18.01.2,09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya [Unit]	3,00	55.750.000	3,00	52.077.753	100,00	93,41		
2.18.01.2,09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya [Unit]	12,00	109.789.409	12,00	97.545.517	100,00	88,85		
2.18.01.2,09.05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	56,00	18.521.000	69,00	17.949.000	123,21	96,91	**[TW4 - Penghambat]** pengajuan SPJ	**[Rekom Berikutnya]** -
2.18.01.2,09.07		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit]	3,00	20.850.000	1,00	9.675.000	33,33	46,40		
2.18.01.2,09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]	1,00	88.286.880	1,00	87.392.500	100,00	98,99		
2.18.01.2,09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]	57,00	55.943.401	51,00	50.203.500	89,47	89,74		
			Rata-rata capaian kinerja (%)			**100,00**	**96,33**	**100,00**	**96,44**		
			Predikat kinerja			**ST**	**ST**	**ST**	**ST**		
2.18.02		**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]**	**40,00**	**211.237.000**	**30,00**	**210.055.900**	**75,00**	**99,44**		
2.18.02.2,02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	jumlah penyusunan peta potensi investasi [dokumen]	2,00	211.237.000	2,00	210.055.900	100,00	99,44		
2.18.02.2,02.01		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota [Dokumen]	1,00	88.839.000	1,00	87.903.500	100,00	98,95	**[TW4 - Penghambat]** -	**[Rekom Berikutnya]** Penyelesaian (pencairan)
2.18.02.2,02.02		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota [Dokumen]	1,00	122.398.000	1,00	122.152.400	100,00	99,80		
			Rata-rata capaian kinerja (%)			**75,00**	**99,44**	**75,00**	**99,44**		
			Predikat kinerja			**S**	**ST**	**S**	**ST**		

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja Pada IV		Tingkat Capaian Kinerja dan		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.18.03		**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**	**20,00**	**134.104.100**	**39,29**	**132.038.744**	**196,45**	**98,46**		
2.18.03.2,01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah even promosi [kali]	2,00	134.104.100	2,00	132.038.744	100,00	98,46		
2.18.03.2,01.02		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota [Dokumen]	2,00	134.104.100	2,00	132.038.744	100,00	98,46		
			Rata-rata capaian kinerja (%)			**196,45**	**98,46**	**196,45**	**98,46**		
			Predikat kinerja			**STS**	**ST**	**STS**	**ST**		
2.18.04		**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan [poin]**	**83,00**	**482.718.500**	**87,50**	**478.235.963**	**105,42**	**99,07**		
2.18.04.2,01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]	100,00	482.718.500	100,00	478.235.963	100,00	99,07		
2.18.04.2,01.01		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik [Pelaku Usaha]	1.200,00	131.252.000	2.415,00	129.542.863	201,25	98,70		
2.18.04.2,01.02		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal [Kegiatan Usaha]	500,00	216.033.000	1.056,00	215.039.000	211,20	99,54		
2.18.04.2,01.03		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan [Orang]	90,00	38.356.500	200,00	37.646.500	222,22	98,15		
2.18.04.2,01.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah [Kegiatan Usaha]	150,00	97.077.000	210,00	96.007.600	140,00	98,90		
			Rata-rata capaian kinerja (%)			**105,42**	**99,07**	**105,42**	**99,07**		
			Predikat kinerja			**STS**	**ST**	**STS**	**ST**		
2.18.05		**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]**	**10,00**	**386.000.000**	**58,42**	**384.239.500**	**584,20**	**99,54**		
2.18.05.2,01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]	100,00	386.000.000	67,70	384.239.500	67,70	99,54		
2.18.05.2,01.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal [Kegiatan Usaha.]	60,00	0	0,00	0	0,00	0,00		

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja Pada IV		Tingkat Capaian Kinerja dan		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.18.05.2,01.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal [Pelaku Usaha]	375,00	292.000.000	375,00	290.239.500	100,00	99,40		
2.18.05.2,01.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan [Kegiatan Usaha]	100,00	94.000.000	164,00	94.000.000	164,00	100,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)						**584,20**	**99,54**	**584,20**	**99,54**		
Predikat kinerja						**STS**	**ST**	**STS**	**ST**		
2.18.06		**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**	**30,00**	**104.492.000**	**30,00**	**101.450.000**	**100,00**	**97,09**		
2.18.06.2,01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]	30,00	104.492.000	30,00	101.450.000	100,00	97,09		
2.18.06.2,01.01		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen]	1,00	104.492.000	1,00	101.450.000	100,00	97,09		
Rata-rata capaian kinerja (%)						**100,00**	**97,09**				
Predikat kinerja						**ST**	**ST**				

Sragen, Januari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sragen

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19791225 199810 1 001

PEMERINTAH
KABUPATEN SRAGEN

MAL PELAYANAN PUBLIK

MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA



DPMPTSP

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Soetomo No.5 Telp.0271-892348 (hunting), Fax 0271-894433
Website http://dpmptsp.sragenkab.go.id/, E-mail dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 000.8.6.3/ 29 /18/2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan mekanisme pengumpulan data kinerja lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 66 Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen merupakan acuan bagi pejabat dan pemegang kepentingan dalam melaksanakan pengumpulan data capaian kinerja lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 03-01-2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PEMERINTAH KABUPATEN DPMPTSP SRAGEN

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
NIP. 19791225 199810 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 052/29 /18/2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAANMEKANISME
PENGUMPULAN DATA KINERJA DILINGKUNGAN DINAS
PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

PETUNJUK PELAKSANAAN MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJADI
LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pengambilan keputusan (*decision making*) haruslah didasarkan pada fakta dan bukan hanya mengandalkan pada intuisi saja. Fakta tersebut dihasilkan sebagai hasil analisis data (*data analysis*) menjadi suatu informasi. Data merupakan suatu objek yang terdokumentasikan dan terstruktur, sedangkan informasi merupakan hasil dari pengolahan data. Data dan informasi dapat diperoleh melalui survey, wawancara, observasi, dan eksperimen ataupun didapat dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh pihak lain, meliputi majalah, surat kabar, buku, dan laporan lainnya. Informasi dan analisis menjadi dasar bagi sistem manajemen kinerja (*performance management system*) organisasi. Keberhasilan *knowledge management* di suatu organisasi sangat tergantung kepada ketersediaan data dan informasi yang handal (*reliable*), relevan (*relevance*) dan lengkap (*completness*).

Suatu organisasi yang besar dapat dilihat dari keterkaitan dengan visi, misi, dan nilai- nilai yang diyakini dalam membangun setiap pondasi yang kuat. Sehingga, jika

budayanya solid, manifestasinya bisa terlihat dari perilaku, dan jika perilakunya telah sesuai dengan nilai organisasi, maka secara tidak langsung kinerjanya juga akan meningkat. Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Kinerja organisasi hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu organisasi dari berbagai ukuran yang disepakati. Semakin tinggi kinerja suatu organisasi, maka semakin tinggi tingkat pencapaian tujuanorganisasi.

Agar data pencapaian kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen dapat diukur dan disampaikan dengan benar, tepat waktu dan bertanggung jawab, maka diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan mekanisme pengumpulan data kinerja.

1.2. Dasar Hukum

a) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
b) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan ;
d) Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.

1.3. Tujuan

Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dilakukan secara berkala setiap bulan dan setiap triwulan dalam satu tahun, secara umum bertujuan untuk :

a) Mengumpulkan data realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) yang ada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen
b) Melakukan analisis capaian kinerja dengan mengacu pada target di Penetapan Kinerja (Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK)).

c) Melakukan koordinasi hasil evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK), serta menyusun rencana aksi pencapaian kinerja pada tahap selanjutnya.

1.4. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja ini adalah:

a) Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan serta anggaran Perangkat Daerah di semua jenjang pelaksanaan.

b) Terukurnya *output* dan *outcome* yang dihasilkan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

c) Meningkatnya kooordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan serta anggaran.

1.5. Ruang lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Sragen memuat ketentuan mengenai:

a) Data Kinerja IKU dan IK yang dikumpulkan;

b) Metodologi pelaksanaan pemantauan/monitoring kinerja, kemudian dilakukan evaluasi kinerja yang disertai dengan pengukuran dan pelaporan kinerja;

c) Tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja.

1.5 Pengertian dan Istilah

a) **Pemantauan (*Monitoring*)** adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan apakah input atau sumberdaya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan *output, outcome, benefit* dan *impact* yang diharapkan;

b) **Evaluasi** adalah kegiatan untuk menilai efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan dengan menggunakan indicator-indikator tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan secara sistematik dan obyektif serta terdiri dari evaluasi sebelum kegiatan dimulai, saat kegiatan berlangsung, dan sesudah kegiatan selesai;

c) **Indikator Kinerja** adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan atau sasaranyang akan dicapai.

d) **Indikator Kinerja Utama (IKU)/ *Key Performance Indicators (KPIs)*** adalah ukuran keberhasilan suatu tujuan, sasaran strategis suatu organisasi.

e) **Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan atau target kinerja yang akandicapai.

f) **Pengukuran Kinerja** adalah suatu metode untuk menilai dan mengukur tingkat kemajuan kinerja instansi/unit kerja dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja.

g) **Pelaporan data kinerja** adalah salah satu bentuk media penyampaian informasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program kegiatan dan atau sub kegiatan dan tingkat keberhasilannya suatu pembangunan.

BAB II

JENIS DATA YANG DIKUMPULKAN

Data indikator kinerja terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). IKU menggambarkan capaian kinerja tujuan, sasaran strategis/sasaran penunjang, program Perangkat Daerah, sedangkan IKK menggambarkan capaian kinerja, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.

3.1. Data Indikator Kinerja Utama (IKU)

Data Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi indikator keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi :

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM
1	2	3
1.	**Tujuan Strategis :** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Nilai realisasi penanaman modal
1.1	**Sasaran Strategis:** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN
1.2	**Sasaran Penunjang:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah
18.01	Program Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupten/Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun
18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/ besar
18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM Bidang Perizinan dan Nonperizinan

18.05	Program Pengendalian dan Pelaksanaan	Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM
18.06	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi padaTingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik

3.3. Data Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Data Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ditetapkan dengan Keputusan KepalaPerangkat Daerah yaitu dalam dokumen perencanaan (Renstra, Renja). Data IKK yangmenjadi indikator keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi :

NO	KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
18.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun
18.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
18.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
18.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah
18.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
18.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
18.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
18.01.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

18.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah
18.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
18.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
18.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
18.01.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
18.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
18.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
18.01.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
18.01.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
18.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah
18.01.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
18.01.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
18.01.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
18.03.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah even promosi
18.03.01.02	Pelaksanaan Kegiatan PromosiPenanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota

18.04.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan
18.04.01.01	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegritas Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegritas Secara Elektronik
18.04.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal
18.04.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
18.04.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah
18.05.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
18.05.01.01	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada pelaku usaha penanaman modal
18.05.01.02	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal
18.06.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/ nonperizinan

18.06.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan

BAB III

MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA

Pengumpulan data capaian kinerja menggunakan metode *bottom up*. Data diperoleh dari unit lebih bawah lalu dikumpulkan di unit di atasnya. Untuk mempermudah pengujian ketepatan pengukuran kinerja, maka data capaian harus disampaikan secara lengkap dan dilengkapi dokumen pendukung atas capaian kinerja. Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (bulanan dan triwulan) dan berjenjang dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatanmaupun informasi lainnya.

4.1. Pengumpulan Data Indikator Kinerja Utama

Hasil pengukuran dan evaluasi IKU dan indikator penting lainnya (sasaran penunjang, program), mengikuti ketentuannya sebagai berikut :

(1) Pengukuran IKU dilakukan maksimal 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian OrganisasiSetda dan Bapperida.

(2) Pengukuran IKU dilakukan oleh Tim yang dibentuk OPD.

(3) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membentuk Tim Pengumpulan Data IKU (lintas bidang) untuk membantu melakukan monitoring, evaluasi, pengukuran dan pelaporan kinerja dalam rangka Pengumpulan Data IKU, dan dibuat dalam bentuk *soft-copy*, kemudian diunggah (*upload*) pada *e_sakip* dan *e_monevrkpd.*

(4) Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai koordinator dan bertanggung jawab di tingkat Perangkat Daerah.

4.2. Pengumpulan Data Indikator Kinerja Kegiatan

Pelaksanaan pengumpulan data kinerja kegiatan dilakukan melalui ketentuan sebagai berikut :

(1) Setiap Pejabat Administrator/ Pengawas/ Fungsional yang setara melaporkan hasil kinerja kegiatan/ Sub Kegiatannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilakukan secara berkala setiap bulan atau triwulan.

(2) Rekapitulasi laporan kinerja kegiatan berkala yang sudah terkumpul dan telah divalidasi oleh pimpinan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pembangunan (Laporan POK) dan Bapperida (Monev Triwulan).

(3) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat

membentuk tim kerja untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan danmekanisme kerja sebagai acuan.

4.3. Koreksi Data Indikator Kinerja

Berdasarkan sifatnya data capaian kinerja dapat dikategorikan ke dalam data sementara dan data akhir, sesuai dengan perkembangan capaian dan realisasi. Kondisi ini memungkinkan untuk dilakukan koreksi untuk perbaikan data kinerja.

BAB IV.
ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan dalam rangka evaluasi IKU dan IKK untuk menilai sejauh mana pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Dalam melakukan evaluasi kinerja, hasilnya harus dikaitkan dengan sumber (input atau masukan) yang berada dibawah kewenangannya seperti sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana yang berkaitan dengan pencapaian kinerja.

Analisis capaian kinerja dilakukan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Analisis dalam evaluasi kinerja dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencakup penilaian atas apa yang telah dicapai dengan melakukan pengukuran kinerja, dan dilanjutkan dengan menghitung nilai capaian kinerja kegiatan.

Dalam melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja dilakukan melalui:

(1) Pembandingan pencapaian antara rencana tingkat capaian (target) dengan realisasinya.

(2) Analisis-analisis terhadap terjadinya:
   a. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasarandan
   b. Menjelaskan manfaat dan dampak (baik yang negatif maupun positif) dari keberhasilan tersebut.

Agar penyampaian uraiannya dapat lebih fokus, analisis data dalam evaluasi kinerjadilakukan sesuai dengan indikator kinerja yang dianalisis yaitu:

(1) Evaluasi Kinerja Kegiatan.

   Pada tahapan ini analisis dilakukan dengan menggunakan ukuran prosentase fisik pencapaian indikator kinerja kegiatan (kegiatan dan Sub Kegiatan).

(2) Evaluasi Kinerja Utama

   Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan pada dasarnya menjadi kunci keberhasilan pencapaian kinerja utama dan kinerja lainnya (tujuan/sasaran strategis, sasaran penunjang dan program) yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dengan didasarkan pada evaluasi kinerja kegiatan, dilakukan evaluasi kinerja utama dan kinerja lainnya. Hal ini untuk menjelaskan sejauh mana target kinerja utama yang telah

ditetapkan dapat dicapai beserta hal-hal yang menjadi pendukung ataupun penghambat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Penjelasan kinerja kegiatan dapat dilakukan secara parsial maupun dianalisis antar kegiatan yang berkaitan sehingga dapat dijelaskan bagaimana kontribusi setiap kegiatan terhadap pencapaian kinerja utama.

BAB V
PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja ini merupakan acuan yang harus dipedomani bagi para pelaksana pengumpulan data, analisis, sampai dengan pelaporan capaian kinerja O*utcome* dan O*utput* sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan tujuan dan sasaran yang dipercayakan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen merupakan rangkaian kegiatan sebelum dilakukan pengukuran *Outcome* dan *Output* sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data kinerja juga berfungsi sebagai rangkaian / proses penyampaian laporan kinerja berkala dalam rangkaian pertanggungjawaban kepada Bupati Sragen. Semua ini memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh pihak di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.

Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data capaian kinerja ini disusun selaras dengan perkembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selama ini. Namun demikian, sebagai suatu acuan bagi perwujudan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen, Petunjuk Pelaksanaan ini tentu masih memerlukan penyempurnaan- penyempurnaan lebih lanjut dimasa mendatang. Oleh karena itu, masukan positif bagi penyempurnaan Juklak ini tetap diperlukan agar tujuan pengumpulan data kinerja sebagaimana diuraikan di atas dapat tercapai dengan lebih baik lagi.

Sragen, 02 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PEMERINTAH KABUPATEN DPMPTSP SRAGEN

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19791225 199810 1 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMPULAN DATA KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS
PM PTSP
SRAGEN

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP	:	900/109/18/2022
Tanggal pembuatan	:	06 - 10 - 2022
Tanggal revisi	:	-
Tanggal pengesahan	:	06 - 10 - 2022
Disahkan oleh	:	PLH. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN Asisten Perekonomian dan Pembangunan TUGIYONO, SH NIP. 196708 199303 1 010
Judul SOP	:	**Pengumpulan Data Kinerja**

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;	1 Memiliki kemampuan dan pemahaman tentang perencanaan kinerja;
2 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;	2 Memiliki kemampuan dan pemahaman tentang pengukuran kinerja;
3 Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;	3 Memiliki kemampuan dan pemahaman tentang pelaporan kinerja;
4 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2011-2016	4 Memiliki kemampuan dan pemahaman tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Evaluasi AKIP); dan
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;	5 Memiliki kemampuan dan pemahaman tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
6 Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen	

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1 SOP Surat Masuk	1 APBD, RKA, DPA.
2	2 Dokumen Perencanaan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, RKT, RENCANA AKSI, PERJANJIAN KINERJA).
3	3 Perangkat Pengolahan Data.

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1 Harus dilaksanakan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting bagi penyelenggaraan manajemen kinerja di DPMPTSP Kabupaten Sragen	Disimpan sebagai dokumen pengendalian dan evaluasi Kinerja
2 Harus dilaksanakan sebagai ukuran keberhasilan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas di DPMPTSP Kabupaten Sragen.	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUMPULAN DATA KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PM PTSP

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris / Koord	Subkor PEP	Kasubag/ Subkor				
1	Sekretaris menugaskan Subkor PEP untuk melaporkan data kinerja		Mulai			Instruksi	15 menit	Disposisi	
2	Menyiapkan kertas kerja laporan kinerja dan mengirimkan ke setiap bidang untuk diisi.					DPA, Laporan kinerja periode sebelumnya	45 menit	Kertas kerja laporan kinerja per bidang	
3	Menerima kertas kerja laporan kinerja, mengukur dan mengisi data capaian kinerja dan menyerahkan kepada Kabid					Kertas kerja laporan kinerja, SPJ, data pendukung laporan kinerja	3 hari	Kertas kerja laporan kinerja yang sudah terisi data capaian kinerja per	
4	Memeriksa kertas kerja laporan kinerja. Jika **Ya**, menandatangani kertas kerja laporan kinerja. Jika **Tidak**, mengembalikan kepada Kasubag/ Subkor untuk menyempurnakan. Selanjutnya menyerahkan kepada Subkor PEP.					Kertas kerja laporan kinerja yang sudah terisi data capaian kinerja, SPJ, data pendukung laporan kinerja	60 menit	Kertas kerja laporan kinerja per rumpun yang ditandatangani	
5	Menerima berkas kertas kerja laporan kinerja dan menginput data capaian kinerja pada Laporan kinerja. Menyerahkan kepada Sekretaris untuk diperiksa dan diparaf.					Kertas kerja laporan kinerja yang sudah terisi data capaian kinerja, SPJ, data	45 menit	Draft laporan laporan kinerja	
6	Sekretaris menerima dan memeriksa draft laporan laporan kinerja. Jika **Ya**, menyampaikan kepada Kepala Dinas untuk dimintakan tanda tangan. Jika **Tidak**, menugaskan Subkor PEP untuk menyempurnakan.					pendukung laporan kinerja	15 menit	Draft laporan laporan kinerja	
7	Memeriksa draf laporan kinerja. Jika Ya, menandatangani laporan kinerja. Jika Tidak, menugaskan Sekretaris untuk menyempurnakan					Draft laporan laporan kinerja	10 menit	Laporan kinerja SKPD yang sudah ditanda tangani Kepala Dinas	
8	menandatangani laporan kinerja. Jika **Tidak**, menugaskan Sekretaris untuk menyempurnakan			Selesai		Draft laporan laporan kinerja	10 menit	Dokumen laporan kinerja	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMPULAN DATA KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PM PTSP
SRAGEN

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP	:	980/109/18/2022
Tanggal pembuatan	:	06 - 10 - 2022
Tanggal revisi	:	-
Tanggal pengesahan	:	06 - 10 - 2022
Disahkan oleh	:	PLT. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN Asisten Perekonomian dan Pembangunan TUGIYONO, SH NIP. 196708 199303 1 010
Judul SOP	:	**Pengumpulan Data Kinerja**

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 2 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3 Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2011-2016 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 6 Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen	1 Memiliki kemampuan dan pemahaman tentang perencanaan kinerja; 2 Memiliki kemampuan dan pemahaman tentang pengukuran kinerja; 3 Memiliki kemampuan dan pemahaman tentang pelaporan kinerja; 4 Memiliki kemampuan dan pemahaman tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Evaluasi AKIP); dan 5 Memiliki kemampuan dan pemahaman tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
1 SOP Surat Masuk 2 3	1 APBD, RKA, DPA. 2 Dokumen Perencanaan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, RKT, RENCANA AKSI, PERJANJIAN KINERJA). 3 Perangkat Pengolahan Data.
Peringatan	**Pencatatan dan pendataan**
1 Harus dilaksanakan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting bagi penyelenggaraan manajemen kinerja di DPMPTSP Kabupaten Sragen 2 Harus dilaksanakan sebagai ukuran keberhasilan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas di DPMPTSP Kabupaten Sragen.	Disimpan sebagai dokumen pengendalian dan evaluasi Kinerja

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUMPULAN DATA KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DINAS PM PTSP

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris / Koord	Subkor PEP	Kasubag/ Subkor				
1	Sekretaris menugaskan Subkor PEP untuk melaporkan data kinerja		Mulai			Instruksi	15 menit	Disposisi	
2	Menyiapkan kertas kerja laporan kinerja dan mengirimkan ke setiap bidang untuk diisi.					DPA, Laporan kinerja periode sebelumnya	45 menit	Kertas kerja laporan kinerja per bidang	
3	Menerima kertas kerja laporan kinerja, mengukur dan mengisi data capaian kinerja dan menyerahkan kepada Kabid					Kertas kerja laporan kinerja, SPJ, data pendukung laporan kinerja	3 hari	Kertas kerja laporan kinerja yang sudah terisi data capaian kinerja per	
4	Memeriksa kertas kerja laporan kinerja. Jika **Ya**, menandatangani kertas kerja laporan kinerja. Jika **Tidak**, mengembalikan kepada Kasubag/ Subkor untuk menyempurnakan. Selanjutnya menyerahkan kepada Subkor PEP.					Kertas kerja laporan kinerja yang sudah terisi data capaian kinerja, SPJ, data pendukung laporan kinerja	60 menit	Kertas kerja laporan kinerja per rumpun yang ditandatangani	
5	Menerima berkas kertas kerja laporan kinerja dan menginput data capaian kinerja pada Laporan kinerja. Menyerahkan kepada Sekretaris untuk diperiksa dan diparaf.					Kertas kerja laporan kinerja yang sudah terisi data capaian kinerja, SPJ, data	45 menit	Draft laporan laporan kinerja	
6	Sekretaris menerima dan memeriksa draft laporan laporan kinerja. Jika **Ya**, menyampaikan kepada Kepala Dinas untuk dimintakan tanda tangan. Jika **Tidak**, menugaskan Subkor PEP untuk menyempurnakan.					pendukung laporan kinerja	15 menit	Draft laporan laporan kinerja	
7	Memeriksa draf laporan kinerja. Jika Ya, menandatangani laporan kinerja. Jika Tidak, menugaskan Sekretaris untuk menyempurnakan					Draft laporan laporan kinerja	10 menit	Laporan kinerja SKPD yang sudah ditanda tangani Kepala Dinas	
8	menandatangani laporan kinerja. Jika **Tidak**, menugaskan Sekretaris untuk menyempurnakan			Selesai		Draft laporan laporan kinerja	10 menit	Dokumen laporan kinerja	

PEMERINTAH
KABUPATEN SRAGEN

MAL PELAYANAN PUBLIK

RENCANA AKSI
TAHUN 2023



DPMPTSP

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

RENCANA AKSI
TAHUN 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tahun 2023

DAFTAR ISI

			Hal
HALAMAN JUDUL			ii
DAFTAR ISI			iii
BAB I.	PENDAHULUAN		1
	1	Latar Belakang	1
	2	Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi	2
	3	Maksud dan Tujuan	4
	4	Landasan Hukum	4
BAB II.	RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA		6
	1	Ikhtisar perjanjian Kinerja Tahun 2023	6
	2	Rencana Aksi Tahun 2023	12
BAB III.	PENUTUP		19

BAB I

PENDAHULUAN

1) LATAR BELAKANG

Rencana Aksi adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Aksi ini memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena merupakan produk perencanaan terkecil pada unit organisasi Pemerintah Daerah. Rencana Aksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2023 merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan perangkat daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat, sehingga kualitas penyusunan Rencana Aksi akan menentukan kualitas pelayanan pada masyarakat dalam kaitan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Proses penyusunannya dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Aksi dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja tahun lalu, dan Renstra yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Kerja Tahunan, adalah sebagai berikut:

a. Berpedoman pada Renstra dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
b. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Rencana Kerja Tahunan didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing perangkat daerah;

c. Penyusunan Rencana Aksi bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

d. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Rencana Aksi dengan dokumen RKPD dan Renstra merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Rencana Aksi merupakan penjabaran dana dan hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra dan RKPD. Rencana Aksi merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, dasar penyusunan RKA-DPA dan RAPBD.

2) TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

a. Tugas

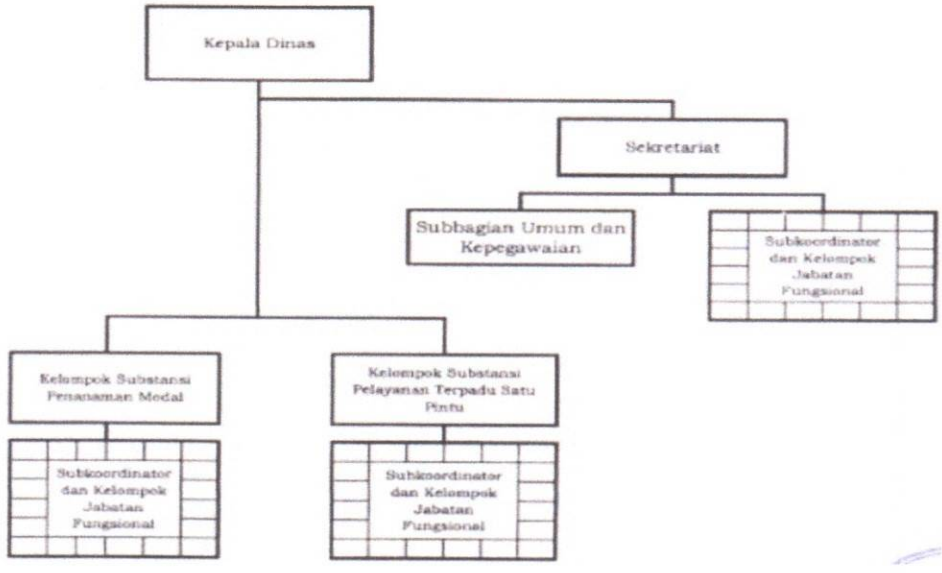
1. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

c. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN



d. Sumber Daya Manusia

TABEL 1.1
JUMLAH ASN BERDASAR GOLONGAN

Golongan / Ruang	Esselon				Staf	Jumlah
	II	III	IV			
Golongan IV/c	1					
Golongan IV/b		1		2		
Golongan IV/a			1			
Jumlah Golongan IV	1	1	1	2	0	5
Golongan III/d				8	7	
Golongan III/c				1		
Golongan III/b						
Golongan III/a					3	
Jumlah Golongan III	0	0	0	9	10	19
Golongan II/d						
Golongan II/c						
Golongan II/b						
Golongan II/a					1	
Jumlah Golongan II	0	0	0	0	1	1
Golongan I/d						
Golongan I/c						
Golongan I/b						
Golongan I/a						
Jumlah Golongan I	0	0	0	0	0	0
Total	1	1	1	11	11	25

Sumber Data : DPMPTSP Tahun 2022

TABEL 1.2

JUMLAH ASN BERDASAR PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG
1	DOKTOR (S3)	-
2	PASCASARJANA (S2)	5
3	SARJANA (S1)	19
4	SARJANA MUDA (D3)	1
5	SLTA / SMEA / MA	0
6	SLTP	0
7	SD	0
JUMLAH		**25**

Sumber data : DPMPTSP Tahun 2022

3). MAKSUD DAN TUJUAN

a) Maksud dari Rencana Aksi Tahun 2023 adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.

b) Tujuan dari Rencana Aksi ini adalah menyediakan peta jalan implementasi kegiatan lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Rencana aksi ini juga menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.

4). LANDASAN HUKUM

a) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

b) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan ;

d) Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.

BAB II

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

1) IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Sebagai tolok ukur pencapaian kinerja terhadap target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen berdasarkan tujuan/ sasaran strategis jangka menengah serta dengan telah disahkannya Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. Maka Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

No	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)	TARGET					KONDISI AKHIR
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**TUJUAN** : Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Nilai realisasi penanaman modal (trilyun rupiah)	**Alasan Pemilihan Indikator:** Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah . **Formulasi Pengukuran:** Nilai investasi dalam tahun berjalan. **Tipe Perhitungan:** Komulatif **Sumber Data:** Pengolahan data sistem informasi perizinan dan penanaman modal	1,50	1,55	1,60	1,65	1,70	8,00
1.1	**SASARAN** : Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN (investor)	**Alasan Pemilihan Indikator:** Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam peningkatan iklim usaha yang berdaya saing dan kualitas penyelenggaraan perizinan berusaha, yang mendukung peningkatan jumlah PMA/ PMDN (investor). **Formulasi Pengukuran:** Jumlah PMA/ PMDN (penanam modal/ investor) dalam tahun berjalan. **Tipe Perhitungan:** Komulatif **Sumber Data:** Pengolahan data sistem informasi perizinan dan penanaman modal	1.250	1.313	1.378	1.447	1.519	6.907

Dari indikator kinerja utama tersebut diperjanjikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dengan Bupati Sragen sebagai pemberi mandat dalam bentuk Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2023 sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1

PERJANJIAN KINERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	4	
1	**Tujuan Strategis :** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Nilai realisasi penanaman modal	1,550	trilyun rupiah
2	**Sasaran Strategis:** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN	1.313	investor
3	**Sasaran Penunjang:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	BB (70,30)	predikat

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupten/Kota	5.364.340.708	DAU
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	211.237.000	DAU
3	Program Promosi Penanaman Modal	141.240.500	DAU
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	507.849.000	DAU
5	Program Pengendalian dan Pelaksanaan	386.00.000	DAK NON FISIK

6	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	108.392.000	DAU
	JUMLAH	6.719.059.208	

Untuk dapat merealisasikan capaian kinerja sesuai dengan target pada rencana kinerja tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan PElayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen, maka terdapat 5 (lima) Program yang mendukung sasaran strategis/IKU dan 1 (satu) Program yang mendukung sasaran penunjang/ kinerja penunjang.

a. Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang mendukung IKU antara lain:

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Keterangan
18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]**	**40%**	
18.02.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah penyusunan peta potensi investasi [dokumen]	2	
18.02.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	
18.02.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota [Dokumen]	2	
18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**	**20%**	
18.03.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah even promosi [kali]	2	
18.03.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota [Dokumen]	2	
18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan [poin]**	**83,00**	
18.04.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]	100%	
18.04.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik [Pelaku Usaha]	1.200	

18.04.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal [Kegiatan Usaha]	500	
18.04.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan [Orang]	93	
18.04.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah [Kegiatan Usaha]	150	
18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]**	**10%**	
18.05.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]	100%	
18.05.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal [Kegiatan Usaha]	60	
18.05.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal [Pelaku Usaha]	315	
18.05.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan [Kegiatan Usaha]	100	
18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**	**40%**	
18.06.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]	40%	
18.06.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen]	1	

b. Program yang mendukung kinerja penunjang:

Kode				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Keterangan
18	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah [%]**	100	

18	1	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (dokumen)	3	
18	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (dokumen)	1	
18	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah [bulan]	12	
18	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]	25	
18	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [dokumen]	1	
18	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut [Paket]	34	
18	1	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40	
18	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah [bulan]	12	
18	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	4	
18	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	6	
18	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	4	
18	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan [Paket]	3	
18	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [Dokumen]	1	
18	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	25	
18	1	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	1	
18	1	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	1	

					Elektronik pada SKPD (dokumen)		
18	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]	2	
18	1	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	
18	1	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	4	
18	1	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan [unit]	5	
18	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]	12	
18	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	4	
18	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	4	
18	1	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	4	
18	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	4	
18	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]	12	
18	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya [Unit]	3	
18	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	12	
18	1	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	56	
18	1	09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3	
18	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	
18	1	09	10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]	31	

2) RENCANA AKSI TAHUN 2023

Secara rinci Rencana Aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS /PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN /PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET PELAKSANAAN PER TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Tujuan Strategis :** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai investasi	trilyun rupiah	1,55	6.719.059.208	0,4	0,8	1,2	1,55	Kepala Dinas
1.1	**Sasaran Strategis :** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN	investor	1.313		300	600	1.000	1.313	Kepala Dinas
18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun**	**%**	40	211.237.000	0	0	20	40	Kepala Dinas
18.02.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah penyusunan peta potensi investasi	dokumen	2	211.237.000	0	0	1	2	Koord Penanaman Modal
18.02.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	dokumen	1	88.839.000	0	0	1	1	Subkor Pengembangan
18.02.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	dokumen	1	122.398.000	0	0	0	1	Subkor Pengembangan
18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/ PMDN skala menengah/ besar**	**%**	20	141.240.500	2	8	15	20	Kepala Dinas
18.03.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi	jumlah even promosi	kali	2	141.240.500	0	0	1	2	Koord Penanaman Modal

	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
18.03.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Dokumen	2	141.240.500	0	0	1	2	Subkor Promosi
18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan**	Poin	83,00	507.849.000	0	83	83	83	Kepala Dinas
18.04.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan	%	100	507.849.000	100	100	100	100	Koord PTSP
18.04.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	1200	131.252.000	300	600	900	1200	Subkor Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
18.04.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	500	216.033.000	100	250	350	500	Subkor Pemantauan, Pengawasan, dan Pengelolaan Pengaduan
18.04.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	93	63.487.000	20	50	70	93	Subkor Pemantauan, Pengawasan, dan Pengelolaan Pengaduan

18.04.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Kegiatan Usaha	150	97.077.000	0	150	150	150	Subkor Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM**	**%**	10	386.000.000	2	5	7	10	Kepala Dinas
18.05.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	**%**	100	386.000.000	100	100	100	100	Koord Penanaman Modal
18.05.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan USaha	60	54.000.000	15	30	45	60	Subkor Pengendalian dan PElaksanaan
18.05.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	315	238.000.000	121	242	300	315	Subkor Pengendalian dan PElaksanaan
18.05.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	100	94.000.000	25	50	75	100	Subkor Pengendalian dan PElaksanaan
18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik**	%	40	108.392.000	0	0	0	40	Kepala Dinas
18.06.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/ nonperizinan	%	40	108.392.000	0	0	0	40	Koord PTSP
18.06.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	Dokumen	1	108.392.000	0	0	0	1	Subkor Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

	Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan								
1.2	**Sasaran Penunjang:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	predikat	70,30	5.364.340.708	0	70,30	70,30	70,30	Kepala Dinas
18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah [%]**	%	100	5.364.340.708	25	50	75	100	Kepala Dinas
18.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	3	3.783.000	1	2	3	3	Sekretaris
18.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	1	3.783.000	1	1	1	1	Subkor PEP
18.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	12	3.190.649.009	3	6	9	12	Sekretaris
18.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	25	3.190.649.009	25	25	25	25	Sunbkor Keuangan
18.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	dokumen	1	76.900.000	0	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut	paket	34	30.685.000	34	34	34	34	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan	orang	40	46.215.000	0	40	40	40	Kasubag Umum dan Kepegawaian

	Peraturan Perundang-Undangan	Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
18.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	550.920.000	3	6	9	12	Sekretaris
18.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	42.108.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	6	219.230.000	1	2	3	6	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4	64.350.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	111.615.000	1	1	2	3	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1	7.992.000	1	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	25	75.000.000	6	12	18	25	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	15.600.000	0	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	15.025.000	0	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah	laporan	2	192.261.000	1	1	2	2	Sekretaris

18.01.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	33.815.000	1	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	99.237.000	3	4	4	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan [unit]	unit	5	59.109.000	3	5	5	5	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	1.053.781.000	3	6	9	12	Sekretaris
18.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	4	5.500.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	471.272.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	105.978.298	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	488.673.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	laporan	12	278.404.401	3	6	9	12	Sekretaris
18.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	54.150.000	3	3	3	3	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	unit	12	111.217.000	12	12	12	12	Kasubag Umum dan Kepegawaian

		dan dibayarkan Pajaknya]								
18.01.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	56	18.521.000	12	24	48	56	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	unit	3	20.850.000	1	2	3	3	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	34.915.000	0	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	31	38.751.401	8	16	24	31	Kasubag Umum dan Kepegawaian

BAB III
PENUTUP

Rencana Aksi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Rencana Aksi disusun dengan mempedomani Rencana Strategis dan Rencana Kerja yang mengacu kepada RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diantaranya memuat kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023 ini berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2023 sehingga menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang ditempuh, agar tidak terjadinya berbagai hambatan.

Rencana Aksi ini secara umum menguraikan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub-kegiatan serta indikator dan target kinerja. Maka dengan mempedomani Rencana Kerja Tahunan ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam DPA-SKPD, diharapkan tugas fungsi dinas dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja prangkat daerah untuk mendukung pencapaian visi misi Bupati Sragen. Yang terpenting bahwa Rencana Aksi ini akan dapat tercapai dengan komitmen dari seluruh unsur pimpinan dan staf yang disertai

pengabdian dan loyalitas yang tinggi serta menjunjung tinggi nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat.

Demikianlah dokumen Rencana Aksi untuk periode tahun 2023 ini yang disusun sebagai bagian dari pelaksanaan perencanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.

Sragen, 3 Januari 2023

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

Asisten Perekonomian dan Pembangunan



TUGIYONO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19670708 199303 1 010



MENTERI INVESTASI /
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 288 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PENERIMA ANUGERAH LAYANAN INVESTASI ATAS PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2023

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah, telah dilakukan penilaian terhadap Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga, telah dibentuk Tim Penilai yang terdiri atas para pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,

Investasi/BKPM, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Sekretariat Kabinet, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, dan Tim Penilai telah melakukan rapat pengusulan nilai terbaik atas hasil rekapitulasi penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga yang masuk dalam kategori sangat baik; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Penetapan Pemerintah Daerah Dan Kementerian Negara/Lembaga Penerima Anugerah Layanan Investasi Atas Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 74);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 159);
8. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160);
9. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1137);
10. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 607);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA PENERIMA ANUGERAH LAYANAN INVESTASI ATAS PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2023.

PERTAMA : Menetapkan Kementerian Negara/Lembaga dengan hasil Penilaian Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga Terbaik Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Peringkat Pertama : Kementerian Perhubungan;
2. Peringkat Kedua : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Peringkat Ketiga : Badan Pengawas Obat dan Makanan.

KEDUA : Menetapkan Pemerintah Provinsi dengan hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemerintah Daerah Terbaik Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Peringkat Pertama : Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
2. Peringkat Kedua : Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peringkat Ketiga : Pemerintah Provinsi Maluku.

KETIGA : Menetapkan Pemerintah Kabupaten dengan hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemerintah Daerah Terbaik Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Peringkat Pertama : Pemerintah Kabupaten Sragen;
2. Peringkat Kedua : Pemerintah Kabupaten Siak;
3. Peringkat Ketiga : Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

KEEMPAT : Menetapkan Pemerintah Kota dengan hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemerintah Daerah Terbaik Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Peringkat Pertama : Pemerintah Kota Surakarta;
2. Peringkat Kedua : Pemerintah Kota Surabaya;
3. Peringkat Ketiga : Pemerintah Kota Manado.

KELIMA : Menetapkan penghargaan khusus kepada Pemerintah Daerah di Kawasan Timur Indonesia sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Kabupaten Merauke;
3. Pemerintah Kota Ambon.

KEENAM : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 OCT 2023

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM
REPUBLIK INDONESIA

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan Yang Terhormat :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

6. Sekretaris Kabinet;
7. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
9. Menteri Perindustrian;
10. Menteri Kelautan dan Perikanan;
11. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Menteri Perdagangan;
14. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
15. Menteri Komunikasi dan Informatika;
16. Menteri Kesehatan;
17. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
18. Menteri Ketenagakerjaan;
19. Menteri Pertanian;
20. Menteri Agama;
21. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
22. Menteri Perhubungan;
23. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
24. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
25. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
26. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
27. Gubernur seluruh Indonesia;
28. Bupati seluruh Indonesia;
29. Walikota seluruh Indonesia;
30. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia; dan
31. Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Memberikan Penghargaan Kepada

KABUPATEN SRAGEN

Sebagai

TERBAIK PERTAMA

Atas Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2023

a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Investasi/Kepala BKPM

Bahlil Lahadalia

CamScanner

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Memberikan Penghargaan Kepada

KABUPATEN SRAGEN

Sebagai

TERBAIK PERTAMA

Atas Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2023

a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Investasi/Kepala BKPM

Bahlil Lahadalia

CamScanner

OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN

PENGANUGERAHAN PREDIKAT PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

(OPINI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK)

TAHUN 2023

DIBERIKAN KEPADA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

93,30
Nilai

ZONA HIJAU

KUALITAS TERTINGGI

JAKARTA, 14 DESEMBER 2023

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

MOKHAMMAD NAJIH, S.H., M.HUM., PH.D.

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Nomor SOP	01/DPMPTSP/82/29/2018
Tanggal pembuatan	26 Oktober 2018
Tanggal revisi	-
Tanggal pengesahan	02 Januari 2019
Disahkan oleh	KEPALA DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN Drs. IYUSEP WAHYUDI, MSi NIP. 19690907 199003 1 005
Judul SOP	**PENYUSUNAN LKjIP**

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 2 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3 Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;	1 Menguasai Mekanisme Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD dan RPJMD) 2 Memahami Renstra DPMPTSP dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 Memahami Instrumen-instrumen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 4 Menguasai Komputer
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
1 SOP Surat Masuk 2 3	1 Komputer 2 Printer 3 ATK
Peringatan	**Pencatatan dan pendataan**
1 Harus dilaksanakan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting bagi penyelenggaraan manajemen kinerja di DPMPTSP Kabupaten Sragen 2 Harus dilaksanakan sebagai ukuran keberhasilan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas di DPMPTSP Kabupaten Sragen.	Laporan Pelaksanaan Kegiatan /Program di DPMPTSP Kabupaten Sragen.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala	Sekretaris	Kasubag PEP	JFU	Bidang-bidang Lain	Persyaratan	Waktu (hari)	Output	
1	Memberi arahan/ disposisi kepada Sekretaris koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP	Mulai					-Kertas disposisi, Surat dari Bupati/Inspektora	2	Disposisi	
2	Menerima, menealaah dan memberi arahan kepada Kasubbag PEP untuk menyiapkan bahan-bahan penyusunan LKjIP DPMPTSP						- Lembar disposisi	5	Disposisi	
3	Menerima, menelaah dan memerintahkan Kasubag PEP untuk mempersiapkan bahan penyusunan LKjIP						- Data awal	6	Laporan Persiapan Rapat	
4	Melaksanakan koordinasi/pengumpulan bahan dengan bidang-bidang lain dalam Penyusunan draft LKjIP dan menyampaikan kepada Kasubag PEP						- Data, Bahan dari bidang lain	10	bahan-bahan materi	
5	Menerima hasil inventarisasi materi untuk penyusunan draft LKjIP						- Data, Bahan dari bidang lain	3	Draft LKjIP	
7	Menelaah dan menganalisa materi Draft LKjIP						- Draft LKjIP, Data	3	Draft LKjIP	
8	Melakukan perbaikan/edit atas naskah draft LKjIP apabila masih perlu perbaikan						- Draft LKjIP, Data	1	Draft LKjIP	
9	Menerima, memeriksa, memaraf dan melaporkan kepada Sekretaris						- Draft LKjIP, Data	1	Draft Final LKjIP	
10	Menerima, memeriksa, memaraf draft LKjIP yang telah disusun dan melaporkan kepada Kepala Badan						- Draft Final LKjIP	2	Draft Final LKjIP	
11	Menerima, memeriksa dan menandatangani draft dokumen menjadi dokumen LKjIP DPMPTSP Kabupaten Sragen						- Draft Final LKjIP	1	Dokumen LKjIP	
12	Dokumen LKjIP didistribusikan kepada Sekretaris/Kasubag PEP dan Fungsional Umum sebagai arsip						Dokumen	1	Dokumen LKjIP	